

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2022



DAFTAR ISI

Pendahuluan
Keadaan Perkara di Peradilan Umum
Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Keuangan, Sarpras, dan TI
Peningkatan Pelayanan Publik
Pengawasan

WWW.PT-JAYAPURA.GO.ID

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2022. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi serta kewajibannya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih belum sempurna, dan demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di tahun mendatang, segala kritik, rekomendasi, dan saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat diharapkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Jayapura ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami, serta sebagai bahan evaluasi dan pengawasan demi peningkatan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima pada masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Jayapura, 20 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

Asli Ginting, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	9
A. Keadaan Perkara	9
B. Penyelesaian Perkara	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	23
BAB III. Sumber Daya Manusia	26
1. Mutasi	31
2. Promosi	32
3. Pensiun	33
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Mengikuti Diklat)	34
BAB IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	38
A. Pengelolaan Keuangan	38
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	40
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	57
BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik	64
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	64
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	65
C. Inovasi Pelayanan Publik	69
BAB VI. Pengawasan	78
A. Internal	78
B. Evaluasi	82
BAB VII. Penutup	84
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Pengadilan Tinggi Jayapura

Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan Peradilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Jayapura dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1963. Dahulu bernama Pengadilan Tinggi Irian Barat, berkedudukan di Hollandia (Jayapura) yang membawahi seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Irian Barat. Seiring perkembangan waktu nama Pengadilan Tinggi Irian Barat tersebut terakhir berubah dengan nama Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka tantangan Pengadilan Tinggi Jayapura sangatlah berat. Lembaga peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk mengambil peran dalam konteks ini. Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI senantiasa menjaga kemandirian Peradilan dan meningkatkan profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Tinggi Jayapura juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan Provinsi baru di Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan serta pada tanggal 8 Desember 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu telah lebih dahulu disahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, maka wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Jayapura meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya dengan pembagian kabupaten/kota sebagai berikut :



Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Selatan
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Biak Numfor • Kabupaten Jayapura • Kabupaten Keerom • Kabupaten Kepulauan Yapen • Kabupaten Memberamo Raya • Kabupaten Sarmi • Kabupaten Supiori • Kabupaten Waropen • Kota Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Fakfak • Kabupaten Kaimana • Kabupaten Manokwari • Kabupaten Manokwari Selatan • Kabupaten Maybrat • Kabupaten Pegunungan Arfak • Kabupaten Teluk Bintuni • Kabupaten Teluk Wondama 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Asmat • Kabupaten Boven Digoel • Kabupaten Mappi • Kabupaten Merauke

Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi Papua Barat Daya
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Deiyai • Kabupaten Dogiyai • Kabupaten Intan Jaya • Kabupaten Mimika • Kabupaten Nabire • Kabupaten Paniai • Kabupaten Puncak • Kabupaten Puncak Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Jayawijaya • Kabupaten Lanny Jaya • Kabupaten Memberamo Tengah • Kabupaten Nduga • Kabupaten Pegunungan Bintang • Kabupaten Tolikara • Kabupaten Yahukimo • Kabupaten Yalimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Sorong • Kabupaten Sorong Selatan • Kabupaten Raja Ampat • Kabupaten Tambrauw • Kota Sorong

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 337/KMA/SK/XI/2022 Tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Tiga Belas Pengadilan Tingkat Banding Baru dan Tiga Puluh Delapan Gedung Pengadilan Tingkat Pertama yang isinya menetapkan tanggal operasional Pengadilan Tinggi Papua Barat pada tanggal 5 Desember 2022.

Dengan beroperasinya Pengadilan Tinggi Papua Barat maka Pengadilan Tinggi Jayapura kini hanya membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

No	Nama Pengadilan	Kelas
1.	Pengadilan Negeri Jayapura	IA
2.	Pengadilan Negeri Merauke	II
3.	Pengadilan Negeri Wamena	II
4.	Pengadilan Negeri Biak	II
5.	Pengadilan Negeri Serui	II
6.	Pengadilan Negeri Nabire	II
7.	Pengadilan Negeri Kota Timika	II

Sementara 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama yang sebelumnya berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura kini telah berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat yaitu:

No	Nama Pengadilan	Kelas
1.	Pengadilan Negeri Sorong	IB
2.	Pengadilan Negeri Manokwari	IB
3.	Pengadilan Negeri Fakfak	II
4.	Pengadilan Negeri Kaimana	II

Namun dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini Pengadilan Tinggi Jayapura tetap menyajikan data-data dari 11 (sebelas) Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Jayapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara pada tingkat banding yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

✚ Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

✚ Kewenangan

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Tinggi Jayapura disertai kewenangan lain berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok, diperlukan perangkat sarana serta prasarana pendukung lainnya, yang secara organisatoris tersusun dalam bentuk Struktur Organisasi Pengadilan, yang akan menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas dalam bentuk *job description* (pembagian tugas) masing-masing aparatur.

Pencapaian pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura tidak saja berkaitan dengan bidang kepaniteraan saja yang menangani urusan administrasi perkara, tetapi sangat bergantung pula kepada bidang kesekretariatan yang akan menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum.

Pengadilan Tinggi Jayapura dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

✦ Fungsi

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan;
- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

C. Visi, Misi dan Tujuan

✦ Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Visi Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PENGADILAN
TINGGI JAYAPURA YANG AGUNG**

✦ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :



Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Jayapura.

Adapun motto Pengadilan Tinggi Jayapura adalah :

Membangun SDM Berintegritas
Memberikan Pelayanan Berkualitas

D. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

E. Program Kerja

Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan yang tertuang lebih detail pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun program kerja tersebut adalah :

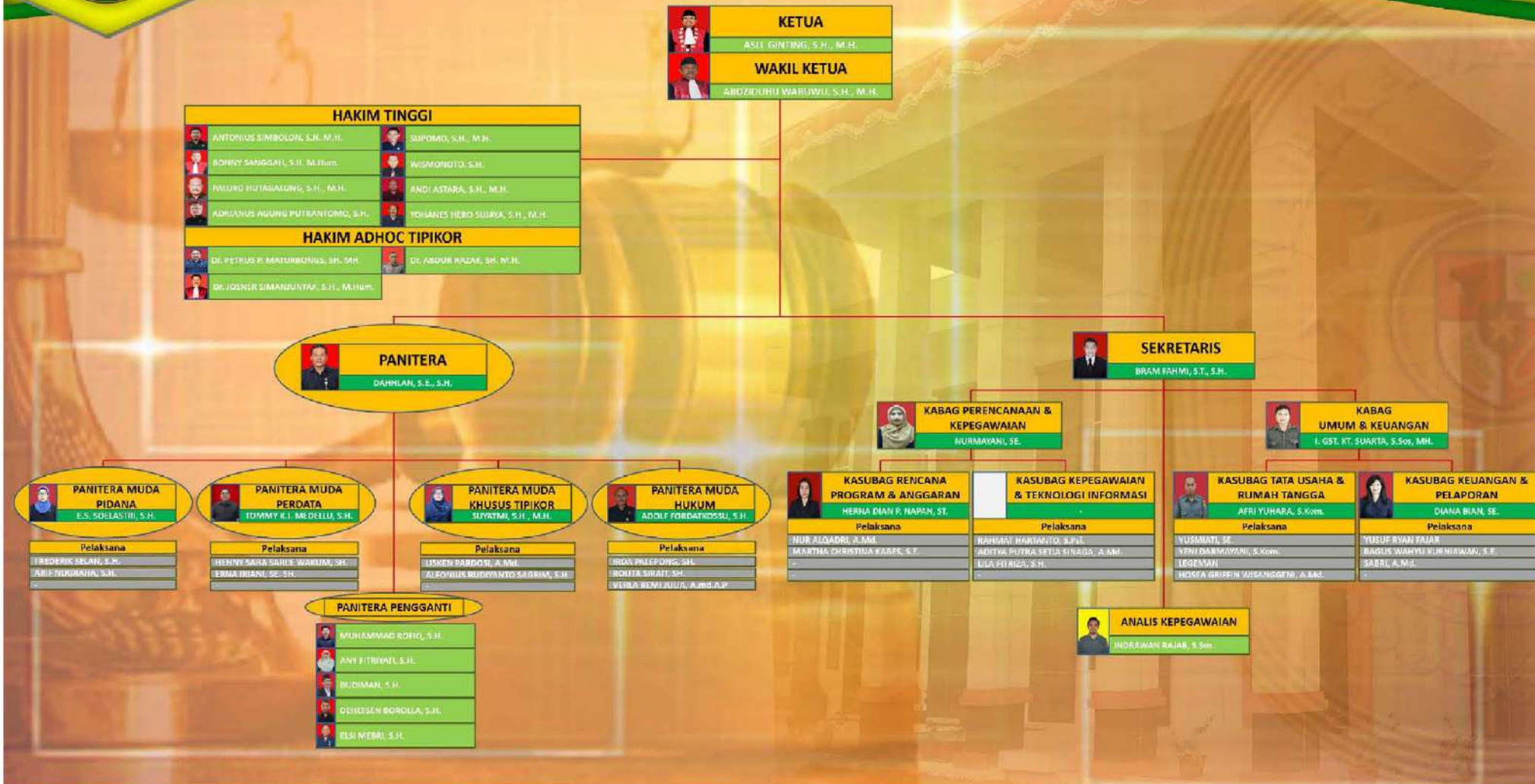
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen.

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

1) Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tahun 2022 pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022				
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI	Perikanan
1	PN Jayapura	694	284	26	40	
2	PN Wamena	357	45			
3	PN Merauke	201	321			NIHIL
4	PN Biak	425	167			
5	PN Nabire	144	184			
6	PN Serui	93	90			
7	PN Timika	178	372			
8	PN Manokwari	239	168	18	5	
9	PN Sorong	367	701			NIHIL
10	PN Fakfak	221	105			
11	PN Kaimana	40	136			
Total		2959	2573	44	45	

2) Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

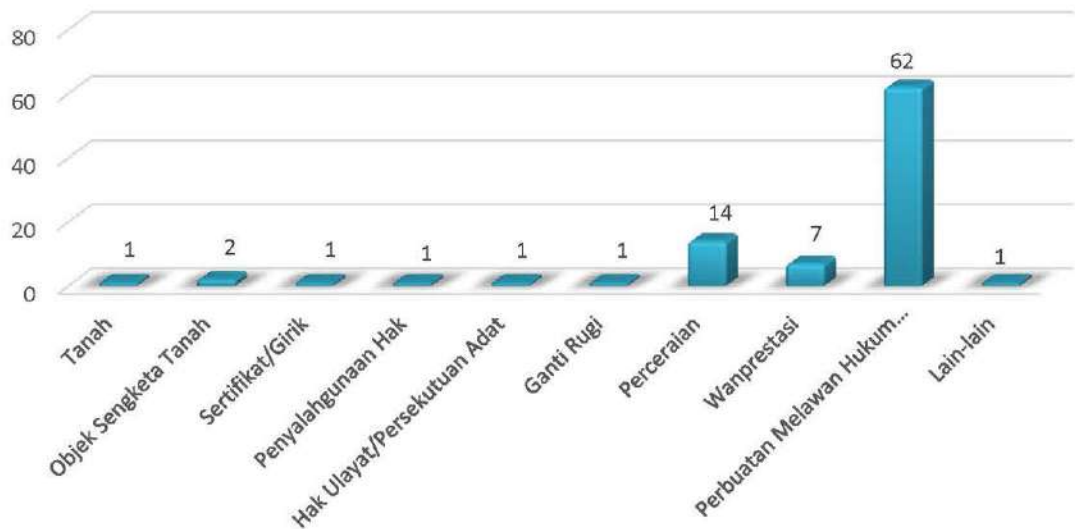
Rincian Perkara Perdata tahun 2022 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Perdata Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk
1	Tanah	1
2	Objek Sengketa Tanah	2
3	Sertifikat/Girik	1
4	Penyalahgunaan Hak	1
5	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	1
6	Ganti Rugi	1
7	Perceraian	14

8	Wanprestasi	7
9	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	62
10	Lain-lain	1
Total		91

Diagram Perkara Perdata Banding Masuk Tahun 2022



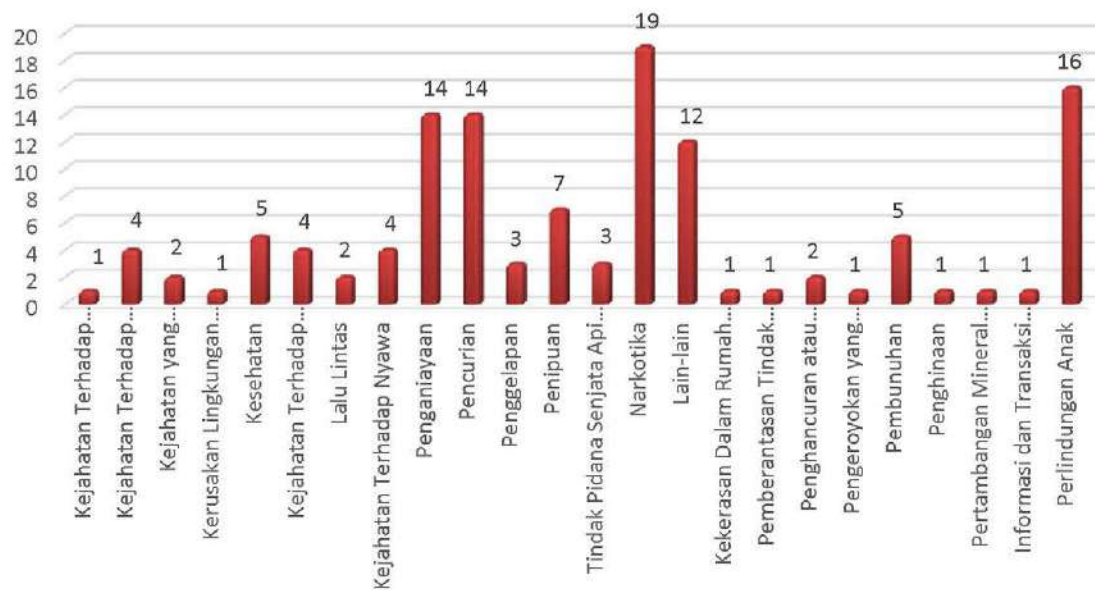
Rincian Perkara Pidana tahun 2022 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Pidana Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2022

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	1
2	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	4
3	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	2
4	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	1
5	Kesehatan	5
6	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	4
7	Lalu Lintas	2
8	Kejahatan Terhadap Nyawa	4
9	Penganiayaan	14
10	Pencurian	14
11	Penggelapan	3
12	Penipuan	7
13	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	3
14	Narkotika	19
15	Lain-lain	12
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1

17	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1
18	Penghancuran atau Perusakan Barang	2
19	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	1
20	Pembunuhan	5
21	Penghinaan	1
22	Pertambangan Mineral dan Batubara	1
23	Informasi dan Transaksi Elektronik	1
24	Perlindungan Anak	16
Total		124

Diagram Perkara Pidana Banding Masuk Tahun 2022

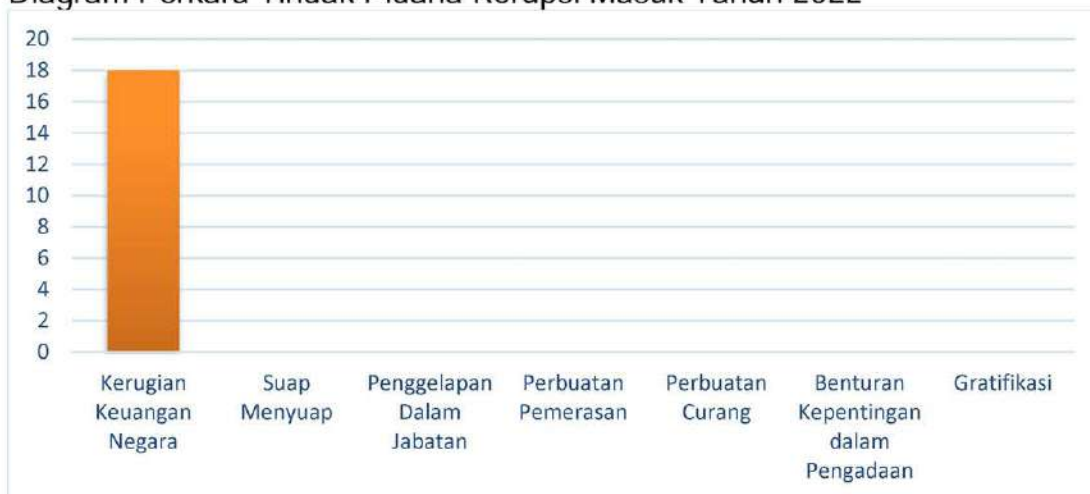


Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Tindak Pidana Korupsi Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2022

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kerugian Keuangan Negara	18
2	Suap Menyuaup	-
3	Penggelapan dalam Jabatan	-
4	Perbuatan Pemerasan	-
5	Perbuatan Curang	-
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	-
7	Gratifikasi	-
Total		18

Diagram Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Tahun 2022



3) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara Tingkat Kasasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara Kasasi			
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI
1	PN Jayapura	14	22	9	21
2	PN Wamena	6	2		
3	PN Merauke	3	6		
4	PN Biak	5	2		
5	PN Nabire	5	3		
6	PN Serui	4	-		
7	PN Timika	4	5		
8	PN Manokwari	6	7	1	1
9	PN Sorong	13	10		
10	PN Fakfak	3	-		
11	PN Kaimana	2	-		
Total		65	57	10	22

4) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara PK			
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI
1	PN Jayapura	-	3	-	-
2	PN Wamena	-	-		
3	PN Merauke	-	-		
4	PN Biak	-	2		
5	PN Nabire	4	-		
6	PN Serui	2	1		
7	PN Timika	-	-		
8	PN Manokwari	-	2	-	-
9	PN Sorong	-	7		
10	PN Fakfak	-	-		
11	PN Kaimana	-	-		
Total		6	15	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

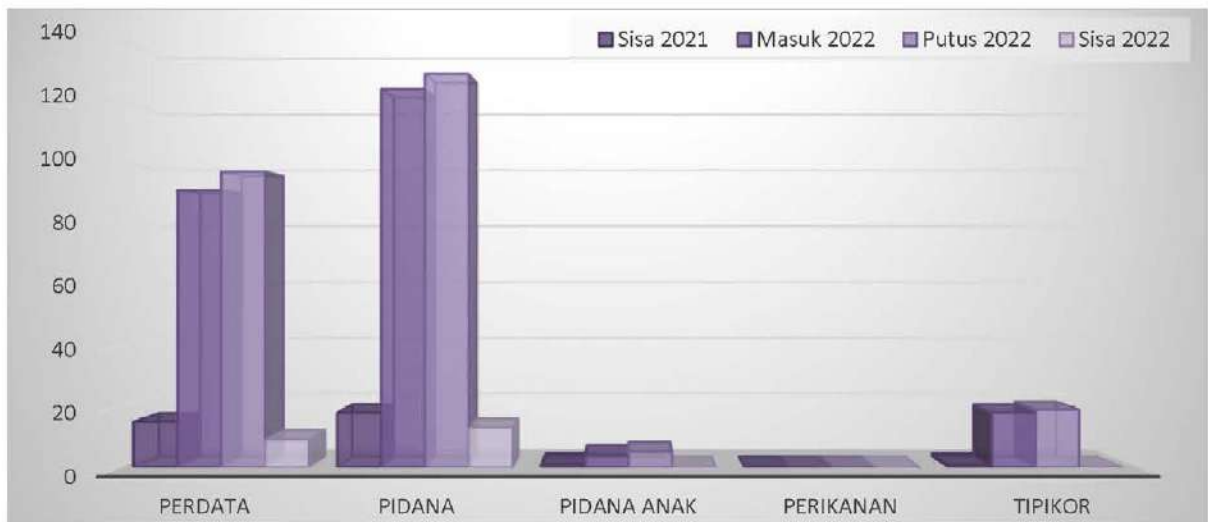
1) Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Selama tahun 2022 jumlah sisa Perkara yang diputus pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Sisa Perkara Banding yang diputus Tahun 2022 Pada Pengadilan Tinggi Jayapura :

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Perdata	15	91	97	9
2	Pidana	18	124	129	13
3	Pidana Anak	1	4	5	-
4	Perikanan	-	-	-	-
5	Tipikor	1	18	19	-
Total		35	237	250	22

Diagram Sisa Perkara Banding yang diputus Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Jayapura



Adapun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri yang terletak di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :

- 1) Pengadilan Negeri Jayapura
- 2) Pengadilan Negeri Wamena
- 3) Pengadilan Negeri Merauke
- 4) Pengadilan Negeri Biak
- 5) Pengadilan Negeri Nabire
- 6) Pengadilan Negeri Serui
- 7) Pengadilan Negeri Kota Timika
- 8) Pengadilan Negeri Manokwari
- 9) Pengadilan Negeri Sorong
- 10) Pengadilan Negeri Fak Fak
- 11) Pengadilan Negeri Kaimana

Rekapitulasi jumlah perkara di 11 (sebelas) Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun 2022, sebagaimana data tabel dibawah ini :

Dalam tahun 2022, rekapitulasi sisa Perkara Pidana pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

- Sisa 2021 : 259 perkara
- Masuk : 5484 perkara
- Putus : 5368 perkara
- Sisa : 365 perkara

Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	118	694	649	163
2	Pengadilan Negeri Wamena	1	357	349	9
3	Pengadilan Negeri Merauke	29	179	171	37
4	Pengadilan Negeri Biak	10	425	392	33
5	Pengadilan Negeri Nabire	-	131	101	30
6	Pengadilan Negeri Serui	7	93	99	1
7	Pengadilan Negeri Timika	28	178	168	38
8	Pengadilan Negeri Manokwari	35	210	202	43
9	Pengadilan Negeri Sorong	26	2836	2862	-
10	Pengadilan Negeri FakFak	4	218	213	9
11	Pengadilan Negeri Kaimana	-	40	39	1
Total		258	5361	5245	364

Grafik sisa Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	-	31	31	-
2	Pengadilan Negeri Wamena	1	1	1	1
3	Pengadilan Negeri Merauke	-	15	15	-
4	Pengadilan Negeri Biak	-	12	12	-
5	Pengadilan Negeri Nabire	-	13	13	-
6	Pengadilan Negeri Serui	-	10	10	-
7	Pengadilan Negeri Timika	-	-	-	-
8	Pengadilan Negeri Manokwari	-	16	16	-
9	Pengadilan Negeri Sorong	-	21	21	-
10	Pengadilan Negeri Fakfak	-	3	3	-
11	Pengadilan Negeri Kaimana	-	1	1	-
Total		1	123	123	1

Grafik sisa Perkara Pidana Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi

No	Satker	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	18	26	29	15
2	Pengadilan Negeri Manokwari	4	18	22	3
Total		22	44	51	18

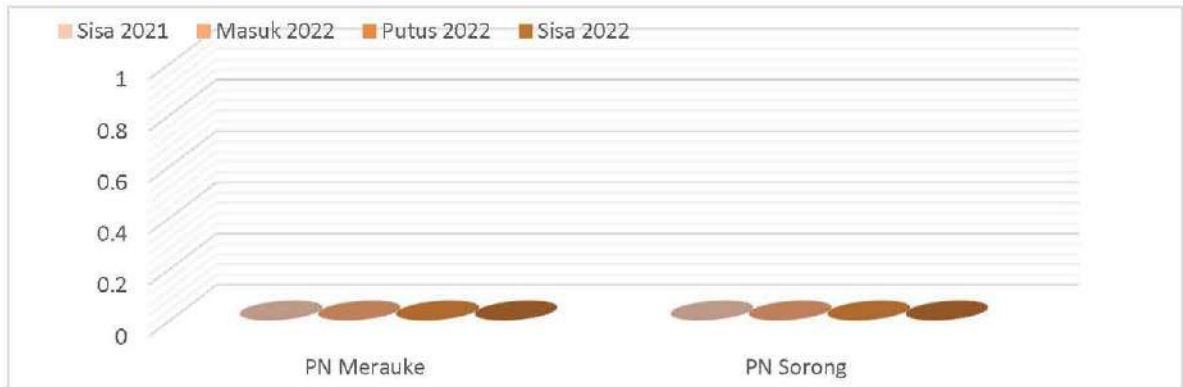
Grafik sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Perikanan

No	Satker	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Merauke	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Pengadilan Negeri Sorong	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total					

Grafik sisa Perkara Perikanan



Dalam tahun 2022, rekapitulasi sisa Perkara Perdata pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

- Sisa 2021 : 283 perkara
- Masuk : 3493 perkara
- Putus : 3483 perkara
- Cabut : 54 perkara
- Sisa : 256 perkara

Tabel Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata Gugatan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	111	284	304	-	91
2	Pengadilan Negeri Wamena	4	23	22	-	5
3	Pengadilan Negeri Merauke	27	69	58	11	27
4	Pengadilan Negeri Biak	6	30	26	2	8
5	Pengadilan Negeri Nabire	4	58	52	3	7
6	Pengadilan Negeri Serui	3	15	17	-	1
7	Pengadilan Negeri Timika	37	109	123	-	23
8	Pengadilan Negeri Manokwari	27	72	73	5	25
9	Pengadilan Negeri Sorong	30	134	130	-	34
10	Pengadilan Negeri Fakfak	5	12	13	2	2
11	Pengadilan Negeri Kaimana	4	24	27	-	1
Total		258	830	845	23	224

Grafik sisa Perkara Perdata Gugatan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata Permohonan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	3	831	827	-	7
2	Pengadilan Negeri Wamena	-	22	22	-	-
3	Pengadilan Negeri Merauke	-	237	233	4	-
4	Pengadilan Negeri Biak	-	120	117	3	-
5	Pengadilan Negeri Nabire	-	112	105	5	2
6	Pengadilan Negeri Serui	-	51	51	-	-
7	Pengadilan Negeri Timika	7	253	258	-	2
8	Pengadilan Negeri Manokwari	1	84	85	13	-
9	Pengadilan Negeri Sorong	-	550	550	-	-
10	Pengadilan Negeri Fakfak	-	87	85	1	1
11	Pengadilan Negeri Kaimana	-	106	106	-	-
Total		11	2453	2439	26	12

Grafik sisa Perkara Perdata Permohonan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	3	38	33	-	8
2	Pengadilan Negeri Wamena	-	7	7	-	-
3	Pengadilan Negeri Merauke	-	15	13	-	2
4	Pengadilan Negeri Biak	1	15	13	3	-
5	Pengadilan Negeri Nabire	-	14	11	-	3
6	Pengadilan Negeri Serui	-	24	24	-	-
7	Pengadilan Negeri Timika	-	10	9	-	1
8	Pengadilan Negeri Manokwari	-	13	12	1	-
9	Pengadilan Negeri Sorong	-	17	16	-	1
10	Pengadilan Negeri Fakfak	-	6	5	1	-
11	Pengadilan Negeri Kaimana	-	6	6	-	-
Total		4	165	149	5	15

Grafik sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Hubungan Industrial (PHI)

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	10	40	48	2
2	Pengadilan Negeri Manokwari	-	5	2	3
Total		10	45	50	5

Grafik sisa Perkara Hubungan Industrial (PHI)



2) Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Adapun Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 3 Bulan)	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (lebih dari 3 Bulan)
1	Perdata	97	94	3
2	Pidana	129	126	3
3	Pidana Anak	5	5	-
4	Perikanan	-	-	-
5	Tipikor	19	19	-
Total		250	244	6

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 5 Bulan)	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (Lebih dari 5 Bulan)
1	Pengadilan Negeri Jayapura	1612	31
2	Pengadilan Negeri Wamena	401	-
3	Pengadilan Negeri Merauke	522	29
4	Pengadilan Negeri Biak	49	-
5	Pengadilan Negeri Nabire	247	35
6	Pengadilan Negeri Serui	191	-
7	Pengadilan Negeri Timika	498	-

8	Pengadilan Negeri Manokwari	29	5
9	Pengadilan Negeri Sorong	2862	-
10	Pengadilan Negeri Fakfak	269	3
11	Pengadilan Negeri Kaimana	263	2
Total		6943	105

3) Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Putus	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
1	Pengadilan Negeri Jayapura	7478	7389
2	Pengadilan Negeri Wamena	401	388
3	Pengadilan Negeri Merauke	490	464
4	Pengadilan Negeri Biak	148	147
5	Pengadilan Negeri Nabire	282	253
6	Pengadilan Negeri Serui	191	184
7	Pengadilan Negeri Timika	498	472
8	Pengadilan Negeri Manokwari	460	405
9	Pengadilan Negeri Sorong	2862	1578
10	Pengadilan Negeri Fakfak	312	291
11	Pengadilan Negeri Kaimana	265	252
Total		13387	11823

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi

Adapun jumlah perkara yang berhasil di Mediasi tahun 2022 di Wilayah Pengadilan tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara yang Dimediasi tahun 2022	Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi
1	Pengadilan Negeri Jayapura	297	6
2	Pengadilan Negeri Wamena	12	-
3	Pengadilan Negeri Merauke	49	3
4	Pengadilan Negeri Biak	12	-
5	Pengadilan Negeri Nabire	4	2
6	Pengadilan Negeri Serui	6	3
7	Pengadilan Negeri Timika	69	3

8	Pengadilan Negeri Manokwari	72	-
9	Pengadilan Negeri Sorong	120	3
10	Pengadilan Negeri Fakfak	8	4
11	Pengadilan Negeri Kaimana	16	5
Total		665	29

5) Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Adapun jumlah perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi tahun 2022 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Anak tahun 2022	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022
1	Pengadilan Negeri Jayapura	31	2
2	Pengadilan Negeri Wamena	-	-
3	Pengadilan Negeri Merauke	15	1
4	Pengadilan Negeri Biak	12	3
5	Pengadilan Negeri Nabire	13	4
6	Pengadilan Negeri Serui	10	-
7	Pengadilan Negeri Timika	4	1
8	Pengadilan Negeri Manokwari	16	4
9	Pengadilan Negeri Sorong	21	3
10	Pengadilan Negeri Fakfak	3	-
11	Pengadilan Negeri Kaimana	1	-
Total		126	18

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1) Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Dalam tahun anggaran 2022 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan POSBAKUM kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk POSBAKUM dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
PN JAYAPURA	Rp. 40.800.000	Rp. 40.800.000
PN WAMENA	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
PN MERAUKE	Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000
PN BIAK	Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000
PN NABIRE	Rp. 12.000.000	Rp. 11.800.000
PN SERUI	Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000
PN TIMIKA	Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000
PN MANOKWARI	Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000
PN SORONG	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
PN FAK-FAK	Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000
PN KAIMANA	Rp. 24.000.000	Rp. 23.000.000

2) Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling/pelayanan terpadu dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan melaksanakan sidang di tempat / di luar gedung Pengadilan / Zitting Plaatz.

Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang/penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat dan menyelesaikan perkara dengan biaya ringan (murah). Dalam tahun anggaran 2022 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan

anggaran untuk kegiatan Sidang keliling kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang diluar gedung Pengadilan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
PN JAYAPURA	Rp. -	Rp. -
PN WAMENA	Rp. -	Rp. -
PN MERAUKE	Rp. 170.000.000	Rp. 169.999.547
PN BIAK	Rp. -	Rp. -
PN NABIRE	Rp. 115.000.000	Rp. 115.000.000
PN SERUI	Rp. -	Rp. -
PN TIMIKA	Rp. -	Rp. -
PN MANOKWARI	Rp. 249.800.000	Rp. 249.800.000
PN SORONG	Rp. -	Rp. -
PN FAK-FAK	Rp. -	Rp. -
PN KAIMANA	Rp. -	Rp. -

3) Penyelesaian Perkara Perikanan

Untuk persiapan pelaksanaan pembentukan pengadilan perikanan, diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: SKB.04/MEN/2005 dan WKMA/Yud/01/SKB/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pembentukan Pengadilan Perikanan.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Diterbitkannya Perpu ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memberantas IUU Fishing hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu persiapan dan pemahaman tentang kewenangan antar pengadilan negeri, serta memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan perangkat penunjang pelaksanaan lainnya salah satunya yaitu perekrutan Hakim Ad Hoc Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) UU Perikanan.

Dalam tahun anggaran 2022 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Perkara Perikanan kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah

Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk Penyelesaian Perkara Perikanan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
PN JAYAPURA	Rp. -	Rp. -
PN WAMENA	Rp. -	Rp. -
PN MERAUKE	Rp. 1.650.000	Rp. 1.500.000
PN BIAK	Rp. -	Rp. -
PN NABIRE	Rp. -	Rp. -
PN SERUI	Rp. -	Rp. -
PN TIMIKA	Rp. -	Rp. -
PN MANOKWARI	Rp. -	Rp. -
PN SORONG	Rp. 500.000	Rp. 0
PN FAK-FAK	Rp. -	Rp. -
PN KAIMANA	Rp. -	Rp. -

4) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis (miskin).

Dalam tahun anggaran 2022 seluruh satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Tinggi Jayapura mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jayapura telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf. Adapun pembinaan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme diantaranya ialah:

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Komposisi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Tinggi Jayapura menurut keadaan 31 Desember 2022, yaitu:

Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	ASLI GINTING, S.H., M.H. 195804041984031002	Pembina Utama IV/e	KETUA
2.	AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. 196201171988031004	Pembina Utama IV/e	WAKIL
3.	SUPOMO, S.H., M.H. 195911291987021001	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
4.	WISMONOTO, S.H. 195908101988031002	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
5.	ANDI ASTARA, S.H, M.H. 19610720 198803 1 005	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi

6.	ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. 196202081988031002	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
7.	YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. 195907061988031002	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
8.	BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. 196203021988031005	Pembina Utama IV/e	Hakim Tinggi
9.	PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. 196007231992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
10.	ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. 196306111992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
11.	ADI PRASETYO, S.H., M.H. 197002011996031002	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim Non Palu
12.	Hj ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H. 198505222008052001	Penata Tk. I III/d	Hakim Yustisial
13.	Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H. 197005291995031002	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
14.	Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H. 1967042702201104002	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
15.	Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. 1964121602201104021	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
16.	DAHLAN., S.E., S.H. 196512311990031034	Pembina Utama Muda IV/c	Panitera
17.	Hj. SUYATMI, S.H., M.H. 196909131989032002	Pembina IV/a	Panmud Tipikor
18.	TOMMY KENEDY I MEDELLU, S.H. 196208171983031004	III/d Penata Tk. I	Panmud Perdata
19.	E. S. SOELASTRI, S.H. 196012191990032001	III/d Penata Tk. I	Panmud Pidana
20.	ADOLF FORDATKOSSU, S.H. 196204051982031003	III/d Penata Tk. I	Panmud Hukum
21.	MUHAMMAD ROFIQ, S.H. 196204031985031006	III/d Penata Tk. I	Panitera Pengganti
22.	ELSI MEBRI, S.H. 196208121990032003	III/d Penata Tk. I	Panitera Pengganti
23.	DEHEFSEN BOROLLA, S.H. 196112141983031003	III/d Penata Tk. I	Panitera Pengganti
24.	ANY FITRIYATI, S.H. 197410071993032001	III/d Penata Tk. I	Panitera Pengganti
25.	BUDIMAN, S.H. 196208301993031001	III/c Penata	Panitera Pengganti

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

- Pembina Utama (IV/e) : 8 orang
- Pembina Madya (IV/d) : 2 orang
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
- Pembina (IV/a) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 7 orang
- Penata (III/c) : 1 orang

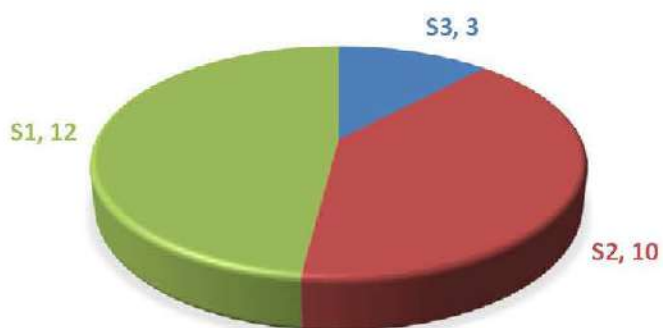
**GRAFIK KOMPOSISI TENAGA TEKNIK
YUDISIAL BERDASARKAN PANGKAT/GOL.
RUANG**



Selain itu, komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Doktor (S3) : 3 orang
- Magister (S2) : 10 orang
- Sarjana (S1) : 12 orang
- D3 : - orang
- SMA/SLTA : - orang

**GRAFIK KOMPOSISI TENAGA TEKNIK
YUDISIAL BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN**



b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang mendukung pelaksanaan administrasi di Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2022 yaitu:

Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1	BRAM FAHMI, S.T., S.H 198101222006041002	IV/b Pembina Tk. I	Sekretaris
1.	I GST KT SUARTA, S.Sos., M.H. 196505131993031002	IV/b Pembina Tk. I	Kabag Umum dan Keuangan
2.	NURMAYANI, S.E. 198012102005022001	IV/a Pembina	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
3.	HERNA DIAN PRIHATINY NAPAN, S.T. 198509022009122004	III/d Penata Tk. I	Kasubag Rencana Program dan Anggaran
4.	AFRI YUHARA, S.Kom. 197804042009041005	III/d Penata Tk. I	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
5.	DIANA BIAN, S.E. 196708071992032009	III/d Penata Tk. I	Kasubag Keuangan dan Pelaporan
6.	ERNA IRIANI, S.E., S.H. 198103162009122001	III/d Penata Tk. I	Analisis Perkara Peradilan
7.	ALFONIUS RUDIYANTO SAGRIM, SH 198308302010041001	III/d Penata Tk. I	Analisis Perkara Peradilan
8.	YENY DARMAAYANI, S.Kom. 198212042009042003	III/d Penata Tk. I	Analisis Protokol
9.	YUSMIATI, S.E. 198109232009042006	III/d Penata Tk. I	Pranata Kearsipan
10.	HENNY SARA SARCE WAKUM, S.H. 197611231997122001	III/c Penata	Analisis Perkara Peradilan
11.	IRDA PALEPONG, S.H. 198704022006042001	III/c Penata	Analisis Perkara Peradilan
12	ROLITA SIRAIT, S.H. 198702142006042002	III/c Penata	Analisis Perkara Peradilan
13.	LISKEN PARDOSI, S.H. 197611052009042005	III/b Penata Muda Tk. I	Analisis Perkara Peradilan
14.	LEGEMAN 196509281993031003	III/b Penata Muda Tk. I	Pengadministrasi Perpustakaan
15.	ARIF NUGRAHA, SH 199609062022031005	III/a Penata Muda	Analisis Perkara Peradilan
16.	FREDERIK SELAN, S.H. 198612032012121005	III/a Penata Muda	Analisis Perkara Peradilan
17.	MARTHA CHRISTINA KABES, S.E 199403262022032011	III/a Penata Muda	Analisis Perencanaan
18.	LILA FITRIZA, S.H. 198310112011012007	III/a Penata Muda	Analisis Tata Laksana
19.	INDRAWAN RAJAB, S.Sos. 198811022019031003	III/a Penata Muda	Analisis Kepegawaian Pertama
20.	RAHMAT HARTANTO, S.Psi. 199311132019031006	III/a Penata Muda	Analisis Organisasi
21.	BAGUS WAHYU KURNIAWAN, S.E. 199407302020121008	III/a Penata Muda	Penyusun Laporan Keuangan

22.	YUSUF RYAN FAJAR 198906162009121001	II/d Pengatur Tk. I	Pengadministrasi Penerimaan
23.	VERLA REMI JULIA, A.md.A.P 199707222022032017	II/c Pengatur	Pengelola Perkara
24.	NUR ALQADRI, A.Md. 198905252019031005	II/c Pengatur	Pengelola Data
25.	ADITYA PUTRA SETIA SINAGA, A.Md. 199604192019041001	II/c Pengatur	Pengelola Sistem dan Jaringan
26.	HOSEA GRIFFIN WISANGGENI, A.Md. 199803212020121001	II/c Pengatur	Pengelola Barang Milik Negara
27.	SABRI, A.Md. 199307242022031006	II/c Pengatur	Pengelola Barang Milik Negara

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

- Pembina Tk. I (IV/b) : 2 orang
- Pembina (IV/a) : 1 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 7 orang
- Penata (III/c) : 3 orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang
- Penata Muda (III/a) : 7 orang
- Pegatur Tk.I (II/d) : 1 orang
- Pengatur (II/c) : 5 orang



Selain itu, komposisi SDM tenaga non teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Magister (S2) : 1 orang
- Sarjana (S1) : 20 orang

- Diploma (D3) : 5 orang
- SMA/Sederajat : 2 orang



1. Mutasi

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional maupun nasional.

Adapun Mutasi di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura selama tahun 2022, yaitu:

a. Mutasi Dalam Papua

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	ADITYA PUTRA SETIA SINAGA, A.Md	Pengelola Sistem Dan Jaringan PN Serui	Pengelola Sistem Dan Jaringan PT Jayapura
2.	IMAM ASROFI, S.H	Analisis Perkara Peradilan PT Jayapura	Panitera Pengganti PN Sorong
3.	ELSI MEBRI, S.H	Panmud Perdata PN Jayapura	Panitera Pengganti PT Jayapura
4.	WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H	Ketua PN Sorong	Wakil PN Jayapura
5.	BEAUTY DEITJE ELISABETH SIMATAU, SH.,	Wakil PN Sorong	Ketua PN Sorong
6.	DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H	Ketua PN Kaimana	Ketua PN Merauke
7.	MUHAMMAD IRSYAD HASYIM, S.H.	Hakim PN Timika	Hakim PN Merauke
8.	YAHYA MUHAYMIN HATTA, S.H	Hakim PN Wamena	Hakim PN fak-fak

b. Mutasi Masuk Papua

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	ISRA ABBAS, S.H.	Panitera PN Sanana	Panitera PN Manokwari
2.	AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT DKI Jakarta	Wakil Ketua PT Jayapura
2.	ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H	Hakim Utama Muda PN Bale Bandung	HT PT Jayapura
3.	DEDDY THUSMANHADI, S.H	Ketua PN Kutai Barat	Ketua PN Serui
4.	DONY HARDITANTO, S.H., M.HUM	Hakim PN Pangkaraya	Wakil PN Fak-Fak
5.	SYAFRUDDIN, S.H.	Hakim PN Kraksaan	Wakil PN Kaimana

c. Mutasi Keluar Papua

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	EKO BUDI PRASETYO, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur PN Biak	Analisis Tata Laksana PTUN Yogyakarta
2.	SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H	Hakim Utama PT Jayapura	Hakim Utama PT Mataram
3.	Dr. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H.	Hakim Utama PT Jayapura	Hakim Utama PT Mataram
4.	HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.	Hakim Utama PT Jayapura	Hakim Utama PT Pontianak
5.	BAGUS SUMANJAYA, S.H.	Hakim Pratama Utama PN Manokwari	Hakim Pratama Utama PN Jombang
6.	RONALD MASSANG, SH., M.H.	Ketua PN Serui	Hakim Madya Pratama PN Manado
7.	CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H.	Ketua PN Manowari	Ketua PN Pemalang
8.	TRI MARGONO, S.H	Ketua PN Fak-fak	Ketua PN Pasuruan
9.	ROMMEL FRANCIKUS TAMPUNOLON, S.H.	Wakil PN Jayapura	Ketua PN Ternate
10.	NATALIA MAHARANI, S.H.,M.HUM	Ketua PN Merauke	Hakim PN Malang

2. Promosi

Selama tahun 2022, di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura telah terjadi promosi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel Daftar Pelantikan Jabatan Tahun 2022

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	YAJID, S.H., M.H.	Ketua PN Wamena	Ketua PN Timika
2.	DEDY HERIYANTO, S.H.	Wakil Ketua PN Fakfak	Ketua PN Wamena
3.	AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT DKI Jakarta	Wakil Ketua PT Jayapura
4.	RUDY SETYAWAN, S.H.	Wakil Ketua PN Nabire	Ketua PN Nabire

5.	MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.	Wakil Ketua PN Masamba	Ketua PN Biak
6.	Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor PT Jayapura
7.	DEDDY THUSMANHADI, S.H.	Ketua PN Kutai Barat	Ketua PN Serui
8.	ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S	Hakim PN Bale Bandung	Hakim Tinggi PT Jayapura
9.	ADOLF FORDATKOSSU, S.H.	PP PT Jayapura	Panmud Hukum PT Jayapura
10.	TOMMY KENEDY I MEDELLU, S.H.	Panmud Hukum PT Jayapura	Panmud Perdata PT Jayapura
11.	SUYATMI, S.H., M.H.	Panmud Pidana PT Jayapura	Panmud Tipikor PT Jayapura
12.	E.S. SOELASTRI, S.H.	Panmud Tipikor PT Jayapura	Panmud Pidana PT Jayapura
13.	BAGUS WAHYU KURNIAWAN, S.E.	CPNS	PNS
14.	NUR YUWONO ADHI NUGROHO, A.Md.	CPNS	PNS
15.	HOSEA GRIFFIN WISANGGENI, A.Md.	CPNS	PNS
16.	ALFRIDS TANGA, S.T.	Sekretaris PN Merauke	Sekretaris PN Manokwari
17.	SEMSI, S.T.	Kasubag PTIP PN Manokwari	Sekretaris PN Merauke
18.	DESSY PALLUMPAK, S.E	Sekretaris PN Manokwari	Sekretaris PN Timika
19.	YURICE J. CAROLINA REMBET, S.T.	Kasubag PTIP PN Fakfak	Sekretaris PN Fakfak
20.	BERLINDA URSULA MAYOR, S.H.,L.LM	Wakil Ketua PN Manowari	Ketua PN Manokwari

3. Pensiun

Pada tahun 2022 tercatat ada 5 (lima) pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memasuki masa purnabakti/pensiun.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	HASAN, S.H.	Panmud Perdata	Pensiun BUP
2	SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun BUP
3	USMANY PIETER, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun BUP
4	RAIMUNDUS NAKAPA, S.H.	Panitera Pengganti	Pensiun BUP
5	ARIS SETIYONO, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan TI	Pensiun Non BUP (Meninggal)

Adapun daftar Hakim dan Pegawai yang memasuki masa Purnabakti (pensiun) pada tahun 2022 di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Hakim/Pegawai yang pensiun
1	Pengadilan Tinggi Jayapura	5
2	Pengadilan Negeri Jayapura	2

3	Pengadilan Negeri Wamena	1
4	Pengadilan Negeri Merauke	3
5	Pengadilan Negeri Nabire	1
6	Pengadilan Negeri Kaimana	2

Formasi Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Ketua	Wakil	Hakim Karier	Hakim Adhoc	Panitera	Sekretaris	KABAG	PANMUD	KASUB	PP	JS/JSP	Staf	Honor
1	PT JAYAPURA	1	1	11	3	1	1	2	3	3	6	0	22	14
2	PN JAYAPURA	1	1	13	6	1	1	0	4	3	14	10	10	10
3	PN MERAUKE	1	0	3	4	1	1	0	4	3	1	2	5	6
4	PN NABIRE	1	0	5	0	1	1	0	2	3	3	4	5	7
5	PN TIMIKA	1	1	5	0	1	1	0	3	2	0	2	9	6
6	PN WAMENA	1	0	6	0	1	1	0	3	3	2	2	10	6
7	PN SERUI	1	0	4	0	1	1	0	3	2	4	2	4	6
8	PN BIAK	1	0	5	0	1	1	0	3	3	2	8	1	7
9	PN MANOKWARI	1	1	4	5	1	1	0	5	2	1	1	9	10
10	PN SORONG	1	1	6	4	1	1	0	3	3	5	10	2	7
11	PN FAK-FAK	1	0	4	0	1	1	0	3	2	0	2	7	11
12	PN KAIMANA	1	0	5	0	1	1	0	3	2	0	1	8	8
	JUMLAH	12	5	70	22	12	12	2	29	31	38	44	92	98

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan setiap individu melalui partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2022, yaitu sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini :

Tabel Daftar Kegiatan Pembinaan SDM Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022

NO.	Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Pelatihan TOT	BRAM FAHMI, S.T., S.H.	SEKRETARIS	24 s.d. 28 Januari
2	Pelatihan Singkat PP	DAHLAN, S.E., S.H.	PANITERA	23 s.d. 25 Mei
		SUYATMI, S.H., M.H.	PANMUD TIPIKOR	

		E.S. SOELASTRI, S.H.	PANMUD PIDANA	
		TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.	PANMUD PERDATA	
		ANY FITRIATI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
		BUDIMAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
		DEHEFSEN BOROLLA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
		MOHAMAD ROFIQ, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
		ADOLF FORDATKOSSU, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
3	FGD Penyusunan Naskah Akademik	DAHLAN, S.E., S.H.	PANITERA	29 Maret
		SUYATMI, S.H., M.H.	PANMUD TIPIKOR	
		E.S. SOELASTRI, S.H.	PANMUD PIDANA	
		TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.	PANMUD PERDATA	
		ANY FITRIATI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
4	Promensisko TPPU dan TPPT/PPSPM	ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	15 s.d. 16 Maret
		Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum	HAKIM AD HOC TIPIKOR	
		ADI PRASETYO, S.H., M.H.	HAKIM YUSTISIAL	
5	Bimtek Percepatan Penyelesaian Perkara	SUYATMI, S.H., M.H.	PANMUD TIPIKOR	8 s.d. 10 Juni
		TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.	PANMUD PERDATA	
		ADOLF FORDATKOSSU, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
6	Penyusunan RKA-KL	BRAM FAHMI, S.T., S.H.	SEKRETARIS	5 s.d. 8 Juli
		HERNA DIAN PRIHATINY NAPAN, S.T.	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
7	Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer	BRAM FAHMI, S.T., S.H.	SEKRETARIS	20 s.d. 28 Juli
8	Lokakarya Analisis Kayu Forensik	PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	27 Juli
9	Pembelajaran e-Learning PPK	ARIS SETIYONO, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TI	18 s.d. 29 Juli
10	Latsar CPNS 2022	ARIF NUGRAHA, S.H.	PELAKSANA	8 Agustus s.d. 26 November
		MARTHA CHRISTINA KABES, S.E.		
11	Latsar CPNS 2022	VERLA REMI JULIA, A.Md. AP.	PELAKSANA	8 Agustus s.d. 26 November
		SABRI, A.Md.		
12	Pelatihan APGAKUM Tindak Pidana Bidang Perpajakan	BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum	HAKIM TINGGI	15 s.d. 27 Agustus
13	Pelatihan Sertifikasi SPPA	ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.	HAKIM YUSTISIAL	29 Agustus s.d. 24 September
14	BIMTEK Administrasi Perkara Eksekusi Pada	AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	3 Oktober

	SIPP	ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	
15	Pelatihan ECSCS	BRAM FAHMI, S.T., S.H.	SEKRETARIS	17 s.d. 21 Oktober
16	Pelatihan SAKIP	ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.	HAKIM YUSTISIAL	17 s.d. 21 Oktober
		AFRI YUHARA, S.Kom	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	
17	Pelatihan Manajemen BMN	INDRAWAN RAJAB, S.Sos	PELAKSANA	7 s.d. 11 November
		RAHMAT HARTANTO, S.Psi.		
18	Pelatihan Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan SPPA	BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum	HAKIM TINGGI	10 November
		ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	HAKIM TINGGI	
19	BIMTEK ASN	YENY DARMAYANI, S.Kom	PELAKSANA	14 s.d. 16 November
		INDRAWAN RAJAB, S.Sos		
		RAHMAT HARTANTO, S.Psi.		
		ADITYA PUTRA SETIA SINAGA, A.Md.		
		HOSEA GRIFFIN WISANGGENI, A.Md,		
20	Workshop Bidang Kesekretariatan	AFRI YUHARA, S.Kom	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	14 s.d. 16 Desember
		INDRAWAN RAJAB, S.Sos	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	

Jumlah SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat tahun 2022 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Hakim yang Mengikuti Diklat	Jumlah Pegawai Teknis yang Mengikuti Diklat	Jumlah Prgawai Non Teknis yang mengikuti Diklat
1	PN JAYAPURA	4	19	-
2	PN WAMENA	3	6	-
3	PN MERAUKE	2	6	-
4	PN BIAK	3	8	-
5	PN NABIRE	6	8	-
6	PN SERUI	2	8	2
7	PN TIMIKA	5	5	4
8	PN MANOKWARI	7	7	2
9	PN SORONG	2	9	4

10	PN FAK-FAK	4	4	-
11	PN KAIMANA	2	4	1

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Terdapat perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022, baik DIPA 400022 dan DIPA 400023. Berikut daftar perubahan Realisasi anggaran tersebut :

Tabel. DIPA 400022

Realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 18,274,264,000	Rp. 17,927,050,239	Rp. 347,213,761

- ❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 14.039.901.000	Rp. 13.235.547.513	Rp. 804.353.487
PN WAMENA	Rp. 8.994.972.000	Rp. 8.943.985.635	Rp. 50.986.365
PN MERAUKE	Rp. 5.304.238.000	Rp. 5.267.284.119	Rp. 36.953.881
PN BIAK	Rp. 4.869.808.000	Rp. 4.439.765.882	Rp. 453.542.118
PN NABIRE	Rp. 5.103.548.000	Rp. 4.665.784.764	Rp. 437.763.236
PN SERUI	Rp. 4.538.441.000	Rp. 4.517.982.354	Rp. 70.958.646
PN TIMIKA	Rp. 5.514.318.000	Rp. 5.141.308.499	Rp. 373.009.501
PN MANOKWARI	Rp. 8.084.403.000	Rp. 7.502.926.815	Rp. 581.476.185
PN SORONG	Rp. 8.243.377.000	Rp. 8.206.295.478	Rp. 37.081.522
PN FAK-FAK	Rp. 4.965.141.000	Rp. 4.748.289.719	Rp. 216.851.281
PN KAIMANA	Rp. 4.367.306.000	Rp. 4.296.487.479	Rp. 70.818.521

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 387,500,000	Rp. 377,996,527	Rp. 9,503,473

❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 924.000.000	Rp. 917.300.400	Rp. 6.699.600
PN WAMENA	Rp. 37.000.000	Rp. 36.968.000	Rp. 12.000
PN MERAUKE	Rp. 122.000.000	Rp. 122.000.000	Rp. 0
PN BIAK	Rp. 23.500.000	Rp. 23.500.000	Rp. 0
PN NABIRE	Rp. 50.500.000	Rp. 45.109.500	Rp. 5.390.500
PN SERUI	Rp. 50.500.000	Rp. 50.500.000	Rp. 0
PN TIMIKA	Rp. 842.500.000	Rp. 837.000.000	Rp. 5.500.000
PN MANOKWARI	Rp. 1.593.880.000	Rp. 1.592.546.250	Rp. 1.333.750
PN SORONG	Rp. 77.500.000	Rp. 77.500.000	Rp. 0
PN FAK-FAK	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0
PN KAIMANA	Rp. 14.532.236.000	Rp. 14.521.565.440	Rp. 10.670.560

Tabel. DIPA 400023

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 452,755,000	Rp. 414,939,391	Rp. 37,815,609

2. Rekapitulasi Realisasi DIPA 03 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 255.070.000	Rp. 227.131.130	Rp. 27.938.870
PN WAMENA	Rp. 46.586.000	Rp. 39.222.000	Rp. 759.000
PN MERAUKE	Rp. 258.498.000	Rp. 258.286.647	Rp. 211.353
PN BIAK	Rp. 95.076.000	Rp. 84.806.000	Rp. 10.270.000
PN NABIRE	Rp. 165.564.000	Rp. 162.454.000	Rp. 3.110.000
PN SERUI	Rp. 90.285.000	Rp. 90.285.000	Rp. 0
PN TIMIKA	Rp. 106.466.000	Rp. 103.363.000	Rp. 3.103.000
PN MANOKWARI	Rp. 440.687.000	Rp. 387.053.850	Rp. 53.633.150
PN SORONG	Rp. 117.106.000	Rp. 101.548.650	Rp. 15.557.350
PN FAK-FAK	Rp. 75.496.000	Rp. 73.695.320	Rp. 1.800.000
PN KAIMANA	Rp. 40.054.000	Rp. 35.950.000	Rp. 4.104.000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan

Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura terletak di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base "G" berdiri diatas tanah seluas 7,856m² dan Luas gedung bangunan kantor Pengadilan Tinggi Jayapura sebelumnya 2,498m², pada tahun anggaran 2014 sampai 2016 telah dilakukan rehabilitasi bangunan prototype yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung. Bahwa sampai dengan saat ini pembangunannya telah mencapai 100% (seratus persen).

Rumah Dinas

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki rumah dinas sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan rincian sebagai berikut:

- o 12 unit rumah dinas type C, yang terletak di Jl. Tanjung Ria No.98
- o 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Angkasa Indah Angkasa Pura
- o 8 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Pasifik Indah III Pasir Dua
- o 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Pematongan Hewan Entrop

Rekapitulasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri se- Wilayah PT Jayapura

Satker	Luas Gedung	Kondisi	Keterangan
PN JAYAPURA	800 m2	Baik	-
PN WAMENA	4.680 m2	Baik	-
PN MERAUKE	1.071 m2	Baik	-
PN BIAK	1.130 m2	Baik	-
PN NABIRE	1.376 m2	Baik	-
PN SERUI	4.030 m2	Baik	-
PN TIMIKA	2.237 m2	Baik	-
PN MANOKWARI	821 m2	Baik	-
PN SORONG	3.500 m2	Baik	-
PN FAK-FAK	1.818 m2	Baik	-
PN KAIMANA	-	-	-

Rekapitulasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri se- Wilayah PT Jayapura

Satker	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
PN JAYAPURA	10 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit
PN WAMENA	7 Unit	0 Unit	0 Unit	7 Unit
PN MERAUKE	14 Unit	0 Unit	0 Unit	14 Unit
PN BIAK	10 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit

PN NABIRE	13 Unit	0 Unit	0 Unit	13 Unit
PN SERUI	7 Unit	2 Unit	0 Unit	9 Unit
PN TIMIKA	10 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit
PN MANOKWARI	4 Unit	2 Unit	4 Unit	10 Unit
PN SORONG	4 Unit	8 Unit	1 Unit	13 Unit
PN FAK-FAK	10 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit
PN KAIMANA	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit

a) Pengadaan

Dalam tahun 2022 terdapat pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa PC Kepaniteraan dengan nilai kontrak Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Printer dengan nilai kontrak Rp. 9.920.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang pengadaannya telah tercapai 100 %.

Rekapitulasi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
PN JAYAPURA	PC Kepaniteraan	12 Unit	Rp 162.000.000
	Printer	2 Unit	Rp 10.000.000
	AC Split	10 Unit	Rp 100.000.000
PN WAMENA	PC Kepaniteraan	2 Unit	Rp 26.988.000
	Printer	2 Unit	Rp 10.000.000
PN MERAUKE	PC Kepaniteraan	2 Unit	Rp 27.000.000
	Printer	2 Unit	Rp 10.000.000
PN BIAK	PC Kepaniteraan	1 Unit	Rp 13.500.000
	Printer	2 Unit	Rp 10.000.000
PN NABIRE	PC Kepaniteraan	3 Unit	Rp 38.239.500
	Printer	2 Unit	Rp 6.870.000
PN SERUI	PC Kepaniteraan	3 Unit	Rp 38.610.000
	Printer Kepaniteraan	2 Unit	Rp 8.698.000
	Printer Untuk PTSP	1 Unit	Rp 3.192.000
PN TIMIKA	Printer	2 Unit	Rp 10.000.000
PN MANOKWARI	PC Kepaniteraan	5 Unit	Rp 49.951.000
	Printer	2 Unit	Rp 10.000.000
PN SORONG	PC Kepaniteraan	5 Unit	Rp 67.500.000

	Printer	2 Unit	Rp	10.000.000
PN FAK-FAK	Printer	2 Unit	Rp	10.000.000
PN KAIMANA	Printer	4 Unit	Rp	18.768.000
	AC Stand	2 Unit	Rp	49.950.000
	Laptop	2 Unit	Rp	28.298.000

2. Pengadaan Layanan Prasarana Internal Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan berupa Tambah Daya dengan nilai kontrak Rp. Rp. 174.824.267,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang pengadaannya telah tercapai 100%.

Rekapitulasi Pengadaan Layanan Prasarana Internal Pembangunan /renovasi gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
PN JAYAPURA	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	1 Unit	Rp 20.000.000
	Tambah Daya Listrik	1 Ins	Rp 150.000.000
PN WAMENA	-	-	-
PN MERAUKE	-	-	-
PN BIAK	-	-	-
PN NABIRE	-	-	-
PN SERUI	-	-	-
PN TIMIKA	-	-	-
PN MANOKWARI	-	-	-
PN SORONG	-	-	-
PN FAK-FAK	-	-	-
PN KAIMANA	-	-	-

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa Meubelair dengan nilai kontrak Rp. 129.727.920,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang pengadaannya telah tercapai 100 %.

Rekapitulasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
PN JAYAPURA	Meubelair	78 Unit	Rp 452.000.000
PN WAMENA	-	-	-

PN MERAUKE	Meubelair	34 Unit	Rp 85.000.000
PN BIAK	-	-	-
PN NABIRE	-	-	-
PN SERUI	-	-	-
PN TIMIKA	Pengadaan Genset	1 Unit	Rp 827.000.000
PN MANOKWARI	Pengadaan Genset	1 Unit	Rp 899.600.000
PN SORONG	-	-	-
PN FAK-FAK	-	-	-
PN KAIMANA	-	-	-

b) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dalam tahun 2022 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

- Pemeliharaan yang bersumber dari belanja barang sebagai berikut :
 1. Perawatan gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura senilai Rp. 1.302.238.000,- (satu milyar tiga ratus dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
 2. Perawatan halaman kantor Pengadilan Tinggi Jayapura senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Rekapitulasi Biaya Pemeliharaan Gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Keterangan
PN JAYAPURA	Rp.	1.154.475.000	-
PN WAMENA	Rp.	964.840.000	-
PN MERAUKE	Rp.	393.703.000	-
PN BIAK	Rp.	388.192.000	-
PN NABIRE	Rp.	400.364.360	-
PN SERUI	Rp.	802.469.000	-
PN TIMIKA	Rp.	796.984.200	-
PN MANOKWARI	Rp.	894.591.774	-
PN SORONG	Rp.	1.518.391.000	-
PN FAK-FAK	Rp.	918.739.000	-
PN KAIMANA	Rp.	353.920.000	-

c) Penghapusan

Dalam tahun 2022, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Gedung dan Bangunan yang dikelola/digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.

Rekapitulasi Penghapusan aset berupa Gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	Aset Berupa	Nilai Aset
PN JAYAPURA	-	-
PN WAMENA	-	-
PN MERAUKE	-	-
PN BIAK	-	-
PN NABIRE	-	-
PN SERUI	-	-
PN TIMIKA	-	-
PN MANOKWARI	-	-
PN SORONG	-	-
PN FAK-FAK	-	-
PN KAIMANA	-	-

Keadaan Aset Tanah Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022

❖ Tanah

Keadaan tanah Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C	3.869	4.434.715.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Type C	1.999	2.262.757.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.856	13.531.758.000
Jumlah			20.229.230.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Jayapura per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Bangunan Kantor Pemerintah	4.252	6.671.801.000
2	Tanah Bangunan Bangunan Kantor Pemerintah	509	702.801.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	608	798.000.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	1.021	1.352.622.000

5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	303	376.398.000
6	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	89.750.000
7	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	494.760.000
8	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	53.438.000
Jumlah			10.539.570.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Wamena per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.950	Rp. 4.422.601.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	2.046	Rp. 4.640.329.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	450	Rp. 1.080.675.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	780	Rp. 1.784.250.000.
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.609	Rp. 3.272.707.000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	5.800	Rp. 11.866.802.000
Jumlah			Rp. 27.066.907.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Merauke per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.197	3.856.470.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24.540	37.914.300.000
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5.403	116.347.000
4	Tanah Padang Alang-Alang	1.200	1.140.000.000
Jumlah			43.027.117.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Biak per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3.324	1.148.410.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.324	7.666.992.000
Jumlah			8.815.402.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Nabire per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.562	28.296.576.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.433	635.528.000

3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.010	2.216.571.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.000	845.882.000
Jumlah			31.994.557.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Serui per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C	2.600	1.483.611.156
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.030	2.069.223.000
3	Tanah Bangunan Balai Sidang / Pertemuan	1.952	160.868.000
Jumlah			3.713.702.156

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Kota Timika per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5.000	5.735.000.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.160	14.407.186.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000	1.213.500.000
Jumlah			21.355.686.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Manokwari per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	985	2.670.812.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	300	831.370.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	584	1.583.507.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.380	3.659.395.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.476	10.069.940.000
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.300	19.461.675.000
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.250	254.625.000
Jumlah			38.531.324.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Sorong per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	13.311	29.306.232.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14.314	24.641.881.000
Jumlah			53.948.113.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Fakfak per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1,615	148.580.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1,292	994.945.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	655	504.403.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1,969	1.426.875.000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1,011	786.054.000
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,503	3.151.214.000
Jumlah			7.012.071.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Kaimana per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11.901	230.000.000
Jumlah			230.000.000

❖ Gedung dan Bangunan

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	12.978.715.000
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	5.850.171.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	-
4	Rumah Negara Golongan II Type B	2	1.144.191.000
5	Rumah Dinas Golongan II Type C	18	4.184.910.000
6	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	761.017.000
7	Pagar Permanen	2	1.046.631.000
8	Pagar Lainnya	1	69.350.000
Jumlah			26.034.985.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Jayapura Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	862.600.000
2	Bangunan Tempat Sidang /Zitting Plats	3	219.860.000

3	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	3	862.610.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	8	1.341.523.400
Jumlah			3.286.593.400

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Wamena Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Gedung Bangunan Kantor Permanen	1	11.282.744.964
2	Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen	7	2.457.574.689
3	Rumah Negara Gol. I Tipe D Permanen	1	864.604.256
4	Pagar Permanen	1	148.861.500
5	Pagar Permanen	1	75.221.500
Jumlah			14. 829.006.909

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Merauke Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	7.366.234.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	1	167.600.000
3	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	2	305.179.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	13	3.450.929.000
5	Rumah Negara Golongan II Lainnya	1	209.566.000
6	Pagar Permanen	1	520.357.000
Jumlah			12.019.865.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Biak Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	13.320.848.936
2	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.039.001.000
3	Rumah Negara Golongan II	10	2.975.124.796
4	Pagar Permanen	1	527.526.000
Jumlah			17.862.500.732

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Nabire Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas Nilai (unit) (Rp)	No
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	5.000.932.000
2	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	2	284.602.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	1	85.969.000
4	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.354.444.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	947.974.000
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	8	1.158.572.000
7	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	5	490.635.000
Jumlah			9.323.128.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Serui Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	11.103.143.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	2	132.972.000
3	Rumah Negara Golongan I Type C	7	1.457.325.000
4	Rumah Negara Golongan II Type D	2	237.136.000
5	Pagar Permanen	2	1.223.534.000
6	Taman	1	1.234.426.000
7	Bangunan Tempat Parkir	2	260.032.000
Jumlah			15.648.568.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Kota Timika Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	21.809.339.000
2	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	207.527.000
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1.086.295.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	9	1.893.610.000
Jumlah			24.996.771.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Manokwari Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (2 Lantai)	1	269.974.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (1 Lantai)	1	30.000.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen/Zitting Plat	1	54.385.000
4	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	9	132.278.000
5	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	1	156.295.000
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	130.704.000
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Rapat & R. Arsip	1	250.000.000
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Sidang Sari	1	270.239.000
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Kesehatan & R. DYK	1	144.128.000
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Aula	1	547.000.000
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen/R. Tahanan Anak	1	93.000.000
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	193.108.000
13	Gedung Garasi/Pool Darurat	1	8.960.000
14	Gedung Pos Jaga	1	14.000.000
Jumlah			2.294.071.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sorong Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	3.756.836.000
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	301.562.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	386.755.000
4	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	6	1.505.972.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	405.925.000
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	15	1.810.557.000
7	Asrama Permanen	1	425.637.000
Jumlah			8.593.244.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Fakfak Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	178.843.000

2	Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	87,240,000
3	Rumah Negara Golongan II Type C	10	1,224,336,001
Jumlah			1,490,419,001

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Kaimana Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-
Jumlah			-

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan persediaan Kantor

Dalam tahun 2022 terdapat pengadaan sarana dan persediaan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Dalam Tahun 2022 telah diadakan pembelian barang-barang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk DIPA 01, senilai Rp. 96.339.875,-
- Untuk DIPA 03, senilai Rp. 18.200.000,-

b) Pemeliharaan Kendaraan dan Inventaris kantor

Dalam Tahun 2022 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas gedung yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 (sembilan) unit senilai: Rp. 192.891.397,- (seratus sembilan puluh dua delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
2. Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 sebanyak 13 (tiga belas) unit senilai: Rp. 11.007.960- (sebelas juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah)
3. Pemeliharaan inventaris kantor lainnya senilai: Rp. 158.597.686,- (seratus juta lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah).

Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Pemeliharaan Kendaraan (Rp)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Rp)
PN JAYAPURA	128.184.403	69.540.000

PN WAMENA	83.616.000	28.720.000
PN MERAUKE	98.222.754	58.224.000
PN BIAK	84.500.000	119.340.000
PN NABIRE	79.982.000	100.314.000
PN SERUI	74.257.152	27.088.300
PN TIMIKA	138.454.000	44.280.000
PN MANOKWARI	131.650.174	25.592.100
PN SORONG	135.803.126	56.032.500
PN FAK-FAK	115.206.000	58.510.000
PN KAIMANA	74.274.119	18.027.240

Rekapitulasi Aset Kendaraan Roda Dua (2) maupun Roda Empat (4) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Jumlah Kendaraan Roda Empat	Jumlah Kendaraan Roda Dua
PN JAYAPURA	5 Unit	7 Unit
PN WAMENA	2 Unit	9 Unit
PN MERAUKE	3 Unit	5 Unit
PN BIAK	2 Unit	10 Unit
PN NABIRE	2 Unit	5 Unit
PN SERUI	3 Unit	11 Unit
PN TIMIKA	5 Unit	8 Unit
PN MANOKWARI	3 Unit	18 Unit
PN SORONG	3 Unit	5 Unit
PN FAK-FAK	3 Unit	4 Unit
PN KAIMANA	2 Unit	2 Unit

c) Penghapusan

Dalam tahun 2022, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.

Rekapitulasi Penghapusan aset berupa peralatan dan mesin Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	Aset Berupa	Nilai Aset (Rp)
PN JAYAPURA	-	-
PN WAMENA	-	-
PN MERAUKE	-	-
PN BIAK	-	-
PN NABIRE	-	-

PN SERUI	-	-
PN TIMIKA	-	-
PN MANOKWARI	-	-
PN SORONG	-	-
PN FAK-FAK	-	-
PN KAIMANA	-	-

Selengkapnya mengenai keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2022 beserta mutasi selama tahun 2022 dapat kami uraikan sebagai berikut :

Keadaan Aset Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022

Keadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
3.01.03.04.002	Portable Generating Set	1	436.725.000
3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	1	698.500.000
3.01.03.05.999	Pompa Lainnya	1	9.400.000
3.02.01.01.001	Sedan	2	445.991.420
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	4	526.850.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	97.301.000
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	2	2.400.000
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	20	38.908.620
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	1	3.700.400
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	31	125.840.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	4	12.650.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	3	13.500.000
3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	2	7.080.000
3.05.01.04.007	Brandkas	2	23.800.000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	4	7.600.000
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	3	9.000.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	2.750.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	4	32.400.000
3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	21	15.520.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	84	443.327.033

3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	169	273.191.032
3.05.02.01.005	Sice	10	120.891.724
3.05.02.01.008	Meja Rapat	9	45.491.631
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	12.440.889
3.05.02.01.022	Partisi	8	44.000.000
3.05.02.01.029	Backdrop TV/Wardrobe	54	103.400.000
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1	5.000.000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	4.500.000
3.05.02.04.001	Lemari Es	3	7.500.000
3.05.02.04.003	A.C. Window	6	193.220.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	21	171.043.448
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat	4	120.000.000
3.05.02.06.002	Televisi	14	105.445.362
3.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga	1	20.000.000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	3	17.098.000
3.05.02.06.008	Sound System	3	99.420.800
3.05.02.06.012	Wireless	3	26.148.900
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	6	4.042.800
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	5	1.008.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	4	1.730.500
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	1	2.250.000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	2	88.000
3.05.02.06.036	Dispenser	3	5.058.000
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	2	5.440.862
3.05.02.06.040	Palu Sidang	1	73.000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	2	6.125.828
3.05.02.06.046	Handy Cam	1	7.410.150
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	2	198.978.875
3.05.02.06.060	Asbak Tinggi	4	3.681.724
3.05.02.06.068	DVD Player	1	2.000.000
3.05.02.06.071	Kabel	10	13.000.000
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	4	6.000.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	19	100.164.450
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	3.200.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	2	19.809.000
3.06.01.02.132	Video Conference	1	18.059.640
3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	4.449.200
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	10	3.300.000

3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	1	10.000.000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance	1	12.616.000
3.06.02.09.005	Network Monitoring System	1	3.026.100
3.07.02.04.999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	3	29.783.000
3.08.01.12.025	Stabilizer	1	5.000.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	0	0
3.10.01.01.004	Internet	1	86.480.000
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	1	61.750.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	26	334.782.034
3.10.01.02.002	Lap Top	22	315.850.018
3.10.01.02.003	Note Book	3	31.370.000
3.10.02.01.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1	25.000.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	77.104.875
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal)	5	28.400.000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	4	17.000.800
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.350.000
3.10.02.04.001	Server	3	159.357.000
3.10.02.04.002	Router	5	19.086.000
3.10.02.04.003	Hub	1	1.122.000
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	1	3.800.000
3.10.02.04.033	Ethernet Converter	4	10.800.000
3.15.04.04.004	Closed Circuit Television (CCTV)	11	51.332.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	165	132.272.800
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	5.000.000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	3	132.000
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	1	114.429.700
3.07.01.08.128	Proyektor Romad Compleat	1	40.000.000
3.08.01.41.101	Generator	1	17.000.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	2	28.887.250

Selama tahun 2022, terjadi mutasi tambah peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
<i>Saldo Awal (1 Januari 2022)</i>		52,896,393,411
<i>Perubahan (1 Januari – 31 Desember 2022)</i>		
<i>Pembelian</i>	73	527.290.794
Transfer Masuk	9	209.480.000
Reklasifikasi Masuk	0	0
Koreksi Pencatatan	1	(149.294.267)
Reklasifikasi Keluar	0	

Penghentian BMN dari penggunaan	0	
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	14.738	53.483.869.938

Keterangan:

- 1 (satu) buah/unit Lemari Kayu Rp 18.870.000,-
- 1 (satu) buah/unit Meja Kerja Kayu Rp 19.980.000,-
- 13 (tiga belas) buah/unit Kursi Besi/Metal Rp 59.902.260,-
- 7 (tujuh) buah/unit Personal Computer Rp 94.500.000,-
- 7 (tujuh) buah/unit Laptop dari Mahkamah Agung Rp 104.930.000,-
- 2 (dua) buah/unit Printer Rp 9.920.000,-
- 1 (satu) buah/unit Scanner dari Mahkamah Agung Rp 19.850.000,-
- 1 (satu) buah/unit Server dari Mahkamah Agung Rp 84.700.000,-
- 1 (satu) buah/unit Gardu Listrik Rp 25.530.000,-
- 1 (satu) buah/unit Jaringan Listrik Lainnya Rp 149.294.267,- yang dikoreksikan pencatatannya menjadi penambahan nominal nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen.

Jaringan

Keadaan Aset Jaringan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Jaringan Listrik Lainnya	1	39.679.750
2	Jaringan Transmisi Tegang Diatas 300 kVA	1	84.488.220
Jumlah		2	124.167.970

Aset Tetap Lainnya

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1.	Monografi	12	12.973.451
2.	Buku Lainnya	38	3.766.125
Jumlah		50	16.739.576

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi *e-Court*

E-Court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang dimaksud dengan aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Sedangkan *Pengguna Terdaftar* adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal pendaftaran perkara Online, Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui mekanisme verifikasi Advokad oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokad disumpah.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 pasal 12, kewenangan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pelaksanaan e-Court adalah:

1. Melakukan penginputan data advokat yang telah diambil sumpah kedalam aplikasi *e-Court*.
2. Melakukan verifikasi terhadap berita acara penyumpahan.

Data pendaftaran advokat pada aplikasi e-Court yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

Jumlah Akun yang Mendaftar	Jumlah Akun yang Terverifikasi	Jumlah Akun yang belum Terverifikasi (Data Invalid)
458	433	25

Akun yang belum terverifikasi dikarenakan masih terdapat kekurangan, misalnya : tidak mengupload dokumen berita acara penyempahan atau salah dalam melakukan upload dokumen.

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif melaksanakan e-Court dengan memilih pengadilan pada saat akan mendaftar perkara baru.

Sedangkan data perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri yang didaftarkan melalui e-Court tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara e-Court	Keterangan
PN Jayapura	272 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Merauke	291 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Nabire	154 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Wamena	52 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Kota Timika	44 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Biak	62 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Serui	47 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Manokwari	169 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Sorong	701 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Fakfak	108 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
PN Kaimana	90 Perkara	<i>No Perkara terdaftar</i>
Jumlah	1990 Perkara	

2. Implementasi SIPP

Selama ini aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkara oleh aparaturnya pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

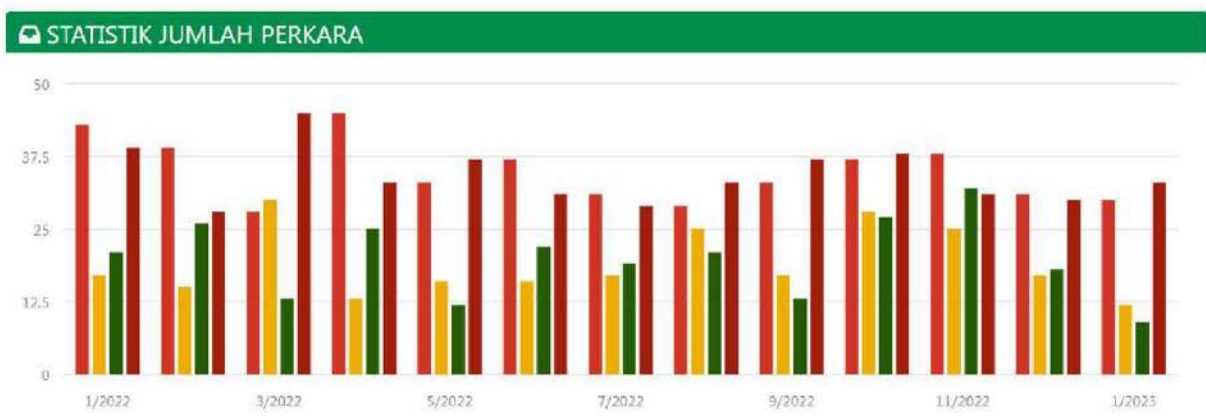
Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil – hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online.

Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara *realtime*. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding, maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web.

Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disinkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu *Update* maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan sinkronisasi setidaknya – tidaknya tiga kali dalam sehari.

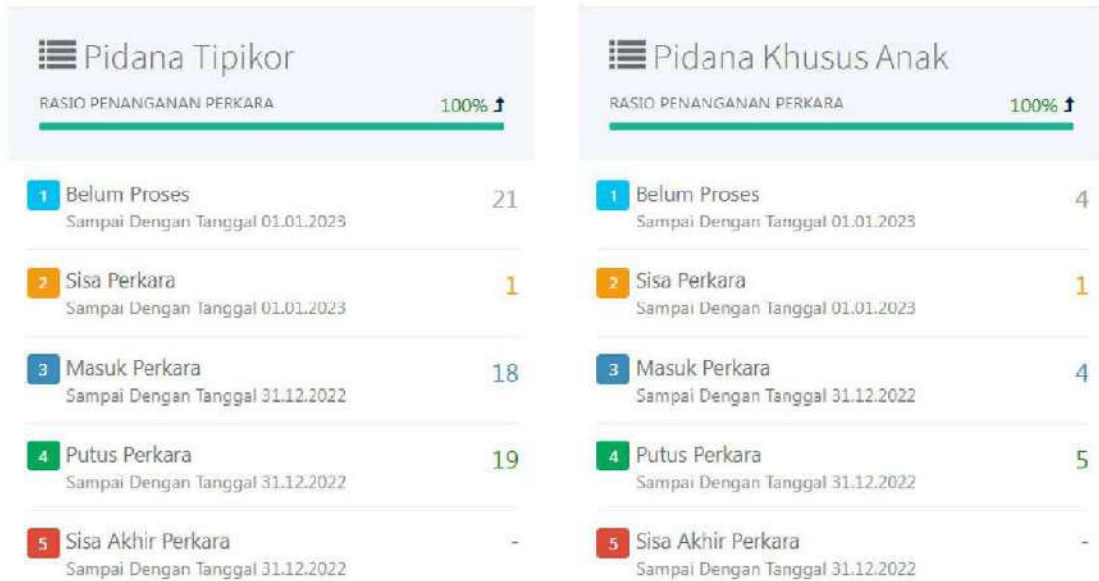
Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan sejak tahun 2016 dan terus diperbarui fitur – fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasi keadaan perkaranya.

Pengadilan Tinggi Jayapura telah melaksanakan penanganan perkara melalui SIPP yang dapat dimonitor kinerjanya pada grafik berikut:



Data penanganan perkara per tanggal 31 Desember 2022

Perdata		Pidana Biasa	
RASIO PENANGANAN PERKARA		RASIO PENANGANAN PERKARA	
1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2023	114	141
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2023	23	18
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2022	91	123
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2022	97	128
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2022	17	13



Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Jayapura setidaknya-tidaknya memiliki 2 (dua) media dalam menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi Pengadilan Tinggi dan media sosial Pengadilan Tinggi Jayapura (Facebook, Instagram, dan Youtube) maupun secara langsung yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada pada Pengadilan, yang didukung ketersediaan perangkat berupa *hardware* dan *software* dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin dan terlatih.

a) Perangkat Keras (*Hard Ware*)

Keadaan *hard ware* pendukung IT pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2022 yaitu :

Pengadilan	PC & Laptop	Server	Router	Modem
PT Jayapura	51 Unit	3 Unit	5 Unit	1 Unit
PN Jayapura	84 Unit	2 Unit	1 Unit	6 Unit
PN Merauke	59 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit
PN Nabire	61 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit
PN Wamena	37 Unit	2 Unit	3 Unit	0 Unit
PN Kota Timika	56 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit
PN Biak	30 Unit	2 Unit	8 Unit	3 Unit
PN Serui	65 Unit	2 Unit	5 Unit	0 Unit
PN Manokwari	50 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit
PN Sorong	52 Unit	2 Unit	1 Unit	4 Unit
PN Fakfak	45 Unit	2 Unit	2 Unit	10 Unit
PN Kaimana	29 Unit	2 Unit	1 Unit	5 Unit

b) Perangkat Lunak (*Soft Ware*)

Software yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Microsoft Office 2010, 2016, 2019, Office 360 sedangkan untuk system operasinya adalah windows XP, windows 7, dan Windows 10. Untuk menangkal virus menggunakan antivirus yang beragam mulai smadav, Norton, kaspersky, PCMAV, dll.

c) Jaringan Internet (*Internet Connection*)

Jaringan internet yang telah terkoneksi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Astinet dengan *bandwidth 20 mbps* dan Indihome dengan *bandwidth 100 mbps* yang di koneksikan ke tiap bagian dalam ruangan dengan menggunakan wireless (WiFi) dan kabel (LAN). Sedangkan jaringan internet pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada umumnya menggunakan Astinet dan Indihome dengan kapasitas *bandwidth* rata-rata 2 – 10 *mbps*, namun untuk pengadilan di wilayah tertentu seperti PN Wamena menggunakan jaringan provider local yang terkoneksi dengan infrastruktur Palapa Ring Timur (Palapa Timur Telematika).

d) Website

Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Tinggi Jayapura telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan demikian website Pengadilan Tinggi Jayapura telah memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat Difable. Sehingga seluruh halaman website dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan perangkat lunak "screen reader" (pembaca layar). Selain itu tata letak website telah memenuhi Standar WAI ARIA (Accessible Rich Internet Application) atau aplikasi internet untuk aksesibilitas yang memastikan aksesibilitas penuh bagi para pengguna website.

Dengan terselesaikannya penyesuaian standarisasi website ini, diharapkan lebih besar manfaatnya untuk transparansi, peningkatan mutu pelayanan informasi publik khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*). Namun, dalam pengembangan ke depannya, website tersebut perlu dikritisi dan diberikan saran yang konstruktif.

➤ Website resmi dan email Pengadilan Tinggi Jayapura dan Satuan Kerja:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Pengadilan Tinggi Jayapura | : pt-jayapura.go.id |
| Email | : ptjayapura@yahoo.co.id |
| 2) Pengadilan Negeri Jayapura | : pn-jayapura.go.id |
| Email | : pnjayapura@yahoo.co.id |
| 3) Pengadilan Negeri Sorong | : pn-sorong.go.id |
| Email | : pnsorong@yahoo.co.id |
| 4) Pengadilan Negeri Biak | : pn-biak.go.id |
| Email | : pnbiak@gmail.com |
| 5) Pengadilan Negeri Manokwari | : pn-manokwari.go.id |
| Email | : pn.manokwari@yahoo.co.id |
| 6) Pengadilan Negeri Nabire | : pn-nabire.go.id |
| Email | : pn.nabire@yahoo.co.id |
| 7) Pengadilan Negeri Merauke | : pn-merauke.net |

Email	: pn_merauke@yahoo.co.id
8) Pengadilan Negeri Kota Timika	: pn-timikakota.go.id
Email	: pnkotatimika@yahoo.co.id
9) Pengadilan Negeri Serui	: pn-serui.go.id
Email	: pn.serui@yahoo.co.id
10) Pengadilan Negeri Wamena	: pn-wamena.go.id
Email	: pnwamena.papua@gmail.com
11) Pengadilan Negeri Fakfak	: pn-fakfak.go.id
Email	: pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
12) Pengadilan Negeri Kaimana	: pn-kaimana.go.id
Email	: pnkaimana@gmail.com

➤ Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Satuan Kerja:

1) Pengadilan Negeri Jayapura	: sipp.pn-jayapura.go.id
2) Pengadilan Negeri Sorong	: sipp.pn-sorong.go.id
3) Pengadilan Negeri Biak	: sipp.pn-biak.go.id
4) Pengadilan Negeri Manokwari	: sipp.pn-manokwari.go.id
5) Pengadilan Negeri Nabire	: sipp.pn-nabire.go.id
6) Pengadilan Negeri Merauke	: sipp.pn-merauke.net
7) Pengadilan Negeri Kota Timika	: sipp.pn-timikakota.go.id
8) Pengadilan Negeri Serui	: sipp.pn-serui.go.id
9) Pengadilan Negeri Wamena	: sipp.pn-wamena.go.id
10) Pengadilan Negeri Fakfak	: sipp.pn-fakfak.go.id
11) Pengadilan Negeri Kaimana	: sipp.pn-kaimana.go.id

e) Publikasi Perkara (*One Day Publish*)

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura telah berbenah dalam Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern yang berbasis teknologi informasi terpadu.

Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan setiap perkara yang telah putus di Pengadilan Tinggi Jayapura langsung di upload di direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga public dapat melihat putusan perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Jayapura. Dalam rangka menyediakan informasi perkara kepada masyarakat telah tersedia aplikasi SIPP-web yang dapat diakses oleh masyarakat pada laman web banding.mahkamahagung.go.id Data pada aplikasi diperbaharui setiap hari, sehingga setiap perubahan tahap yang telah diinput dalam aplikasi dapat diakses oleh masyarakat dan setiap harinya dilakukan sinkronisasi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jayapura menyelenggarakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang bertujuan melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura. Perubahan yang dilakukan baik didalam maupun luar gedung Pengadilan Tinggi Jayapura serta inovasi-inovasi pelayanan publik yang dijalankan bertolak dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.

Dengan kerja keras dan semangat yang tinggi dari pimpinan dan jajarannya, Pengadilan Tinggi Jayapura berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat "A" dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dengan Nomor: 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas I Khusus dan I Tahun 2022

Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar pelayanan publik dan lebih meningkatkan lagi dimasa mendatang baik dalam hal pelayanan publik maupun kinerja aparatur didalamnya.

Pengadilan Tinggi Jayapura juga berkomitmen membina dan memotivasi jajaran Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya untuk memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai program Dirjen Badan Peradilan Umum. Pimpinan dan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu telah melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada semua jajaran aparatur di Pengadilan Tinggi Jayapura dan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya serta memberikan pelatihan Assesor kepada Hakim Tinggi Pengawas sehingga dapat meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura.

Berdasarkan hasil surveilan yang dilakukan Tim APM Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tim APM Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2022, berikut daftar Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperoleh sertifikat Akreditasi :

<i>Satker</i>	Predikat
<i>PN JAYAPURA</i>	" A "
<i>PN WAMENA</i>	" A "
<i>PN MERAUKE</i>	" A "
<i>PN BIAK</i>	" A "
<i>PN NABIRE</i>	" A "
<i>PN SERUI</i>	" A "
<i>PN TIMIKA</i>	" A "
<i>PN MANOKWARI</i>	" A "
<i>PN SORONG</i>	" A "
<i>PN FAK-FAK</i>	" A "
<i>PN KAIMANA</i>	" A "

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, Pengadilan Tinggi Jayapura bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan bebas KKN, serta dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02/3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dengan adanya PTSP masyarakat dan pencari keadilan dapat memperoleh informasi hanya dengan mendatangi meja pelayanan PTSP yang sudah terintegrasi dengan seluruh bagian, sehingga petugas PTSP dapat memberikan pelayanan secara cepat.



Pelayanan PTSP pada PT Jayapura terdiri dari 2 (dua) bagian pelayanan yaitu bagian Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan.

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 sejak bulan Maret tahun 2020, pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi Jayapura dijalankan dengan meningkatkan penerapan protokol kesehatan antara lain dengan menyediakan wastafel dan *handsanitizer/antiseptic* bagi pengunjung maupun petugas untuk mencuci tangan sebelum memasuki area pelayanan Pengadilan Tinggi Jayapura,



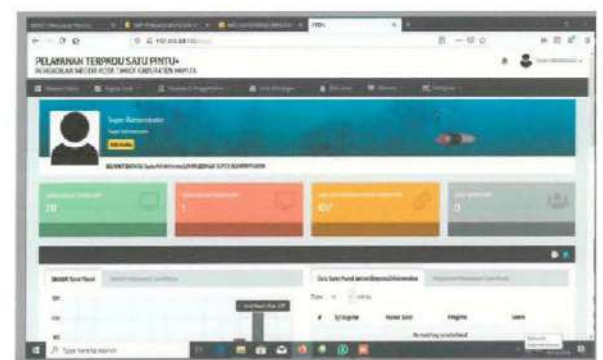
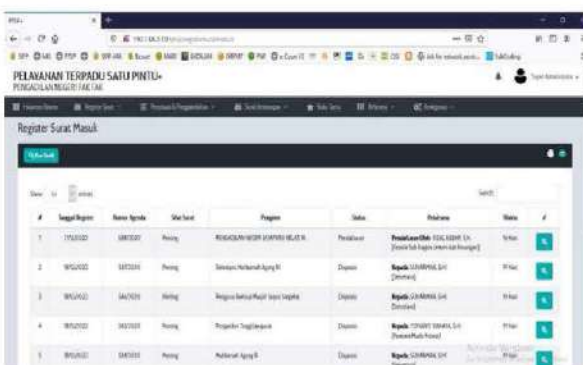
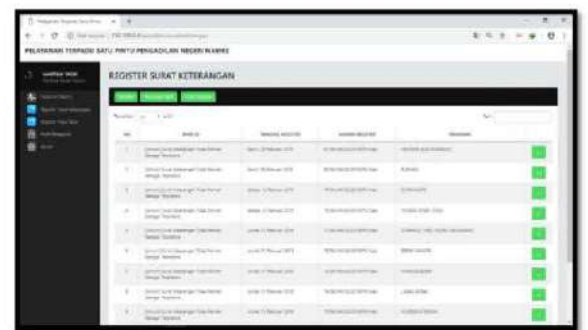
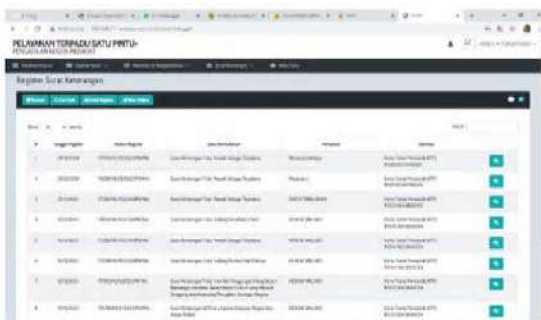
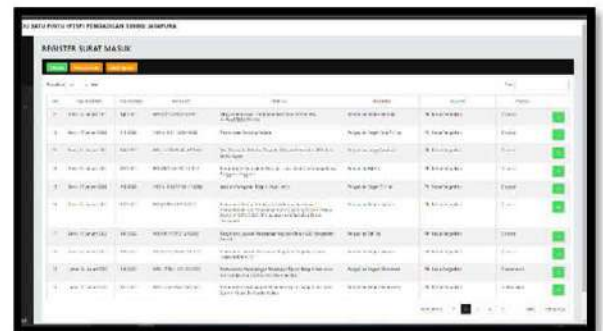
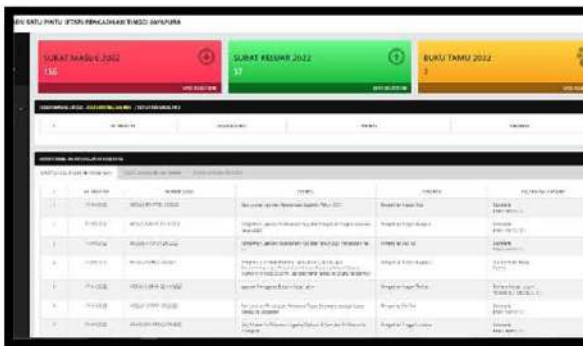
melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang memasuki area Pengadilan Tinggi Jayapura, memasang pelindung untuk menjaga jarak dan kenyamanan antara petugas dan pengunjung, ruang tunggu dan

ruang pelayanan yang diberi pembatas untuk tetap menjaga jarak (*social distancing*), dan sebagainya.

Untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan dalam PTSP, Pengadilan Tinggi Jayapura beserta seluruh satuan kerja dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura memanfaatkan fasilitas aplikasi PTSP. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang pada awalnya diperuntukkan untuk PTSP pada Pengadilan Negeri saja, namun mengingat fitur dan layanan dalam aplikasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi Jayapura melakukan penyesuaian aplikasi sehingga dapat membantu proses pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab PTSP pada Pengadilan Tinggi.

Aplikasi PTSP digunakan untuk pencatatan surat masuk, surat keluar, buku tamu, surat keterangan online, dan sebagainya.

Tampilan aplikasi PTSP PT Jayapura dan beberapa Pengadilan Negeri dalam wilayah PT Jayapura sebagai berikut :



Dalam hal penerimaan tamu, apabila tamu hendak bertemu dengan Hakim atau pegawai Pengadilan, petugas PTSP akan meminta kartu identitas tamu untuk dilakukan pendataan tamu pada aplikasi PTSP Pengadilan Tinggi. Tamu yang sudah didata pada aplikasi kemudian dipersilahkan menunggu di ruang tamu terbuka yang telah disediakan. Petugas PTSP akan menghubungi hakim atau pegawai untuk memberitahukan bahwa ada tamu yang akan menghadap dan menanyakan kesediaannya untuk menerima tamu tersebut.

Menu Buku Tamu pada Aplikasi PTSP PT Jayapura :

UDU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

BUKU TAMU

Tampilkan: 10 | 20 | 50 | 100 | 1000

NO	TANGGAL	TUJUAN	NAMA TAMU	KEPERLUAN	STATUS	
11	Senin, 12 Desember 2021	Kapala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas Pengadilan Tinggi Jayapura, S. Kani	PT Samsul Mida Intematika 100	Bertemu dengan Kepala Umum untuk Mengajukan Masalah Fotografi HP	Ditampa	✓
12	Senin, 13 Desember 2021	Kapala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas Pengadilan Tinggi Jayapura, S. Kani	TRICIA BROBBY (Bayu)	Mau bertemu dengan bagian umum	Ditampa	✓
13	Jumat, 18 Desember 2021	Fasilitas	Raymond Isaac Peluangy	Bertemu dengan Pak Dahan	Ditampa	✓
14	Jumat, 18 Desember 2021	Fasilitas	Anggar	Mengajukan berkas permohonan administratif	Ditampa	✓
15	Selasa, 27 Desember 2021	Fasilitas	ANANDA, SH	Mengajukan berkas untuk penyempurnaan akurasi	Ditampa	✓
16	Selasa, 28 Desember 2021	Fasilitas	CHRISTIAN TERRY COBALSARY	Konfirmasi masalah sebelum ditampainya paku	Ditampa	✓
17	Jumat, 28 Desember 2021	Fasilitas	Dina Regina Dora	Konfirmasi	Ditampa	✓
18	Kamis, 17 November 2021	Konfirmasi	WALYDI SUHARTO	Bertemu dengan bapak Sekretaris	Ditampa	✓
19	Senin, 15 November 2021	Fasilitas	Bapak Idris	Bertemu dengan Pak Pabitra	Ditampa	✓
20	Kamis, 11 November 2021	Kapala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Bank Mandiri Jayapura	Bertemu dengan Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Ditampa	✓

Selanjutnya 1 2 3 4 5 27 Selanjutnya

UDU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

TAMBAH BUKU TAMU

Tanggal: 29/12/2021

Generasi Nomor: 10

Nomor Agenda: 47/2021

Nama Tamu:

Alamat Tamu:

No. Telepon:

Cepukan:

Tujuan:

BUKU TAMU

Tampilkan: 10 | 20 | 50 | 100 | 1000

NO	TANGGAL	TUJUAN	NAMA TAMU	KEPERLUAN	STATUS	
11	Senin, 12 Desember 2021	Kapala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas Pengadilan Tinggi Jayapura, S. Kani	PT Samsul Mida Intematika 100	Bertemu dengan Kepala Umum untuk Mengajukan Masalah Fotografi HP	Ditampa	✓
12	Senin, 13 Desember 2021	Kapala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas Pengadilan Tinggi Jayapura, S. Kani	TRICIA BROBBY (Bayu)	Mau bertemu dengan bagian umum	Ditampa	✓
13	Jumat, 18 Desember 2021	Fasilitas	Raymond Isaac Peluangy	Bertemu dengan Pak Dahan	Ditampa	✓
14	Jumat, 18 Desember 2021	Fasilitas	Anggar	Mengajukan berkas permohonan administratif	Ditampa	✓
15	Selasa, 27 Desember 2021	Fasilitas	ANANDA, SH	Mengajukan berkas untuk penyempurnaan akurasi	Ditampa	✓
16	Selasa, 28 Desember 2021	Fasilitas	CHRISTIAN TERRY COBALSARY	Konfirmasi masalah sebelum ditampainya paku	Ditampa	✓
17	Jumat, 28 Desember 2021	Fasilitas	Dina Regina Dora	Konfirmasi	Ditampa	✓
18	Kamis, 17 November 2021	Konfirmasi	WALYDI SUHARTO	Bertemu dengan bapak Sekretaris	Ditampa	✓
19	Senin, 15 November 2021	Fasilitas	Bapak Idris	Bertemu dengan Pak Pabitra	Ditampa	✓
20	Kamis, 11 November 2021	Kapala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Bank Mandiri Jayapura	Bertemu dengan Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Ditampa	✓

Selanjutnya 1 2 3 4 5 27 Selanjutnya

Setelah menerima pemberitahuan dari petugas PTSP, hakim atau pegawai akan menuju ruang tamu terbuka untuk menemui tamu. Dalam hal ini hakim atau pegawai dapat menolak atau tidak melayani tamu tersebut apabila keperluan tamu berkaitan

dengan masalah perkara sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010.

Dengan terlaksananya PTSP pada Pengadilan Tinggi Jayapura diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi di Pengadilan dan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, prima dan akuntabel.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Standar pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/03 /KPT/SK/4/2018 tanggal 9 April 2018 sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang di berikan oleh aparat badan peradilan.

Selain pelayanan kepada para pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Jayapura juga melakukan inovasi dalam pelayanan kepada aparatur pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

1. Command Center

Sebagai upaya peningkatan pengawasan dan alih ilmu pengetahuan (*transferknowledge*) dalam rangka perbaikan kualitas kinerja dan pelayanan berbasis teknologi informasi terintegrasi, Pengadilan Tinggi Jayapura telah membangun fasilitas Command Center dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- ✓ Melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan Negeri melalui CCTV secara realtime
- ✓ Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap jalannya kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri secara *virtual*
- ✓ Melakukan rapat/pertemuan/sosialisasi/pelatihan secara daring dengan Mahkamah Agung dan instansi terkait
- ✓ Monitoring data kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung secara online:



2. Aplikasi SIMULAN

Proses Usulan Kepegawaian yang selama ini dilakukan secara manual oleh bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Jayapura, kini dapat dilakukan secara digital dan online dan dimanfaatkan oleh para pengguna layanan (aparatur Peradilan Umum) di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengajukan usulan kepegawaian dengan lebih mudah, efisien dan efektif ke Pengadilan Tinggi Jayapura melalui layanan : SISTEM INFORMASI DAN MONITORING USULAN KEPEGAWAIAN (SIMULAN) dapat diakses melalui website pt jayapura dan alamat situs : <https://usulan.pt-jayapura.info/>

SIMULAN merupakan suatu bentuk inovasi dibidang kepegawaian yang berbentuk aplikasi layanan administrasi usulan kepegawaian meliputi kepangkatan, jabatan, mutasi, pensiun, pemberhentian dan kartu pegawai (karpeg,karis/karsu) yang berorientasi kepada pemberian informasi dan monitoring layanan usulan

kepegawaian secara digital dan online dari Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai pihak yang menerima dan melakukan proses usulan, yang dapat diakses melalui internet baik melalui jaringan LAN (*Local Area Network*) maupun jaringan nirkabel dengan sarana komputer, laptop maupun smartphone.

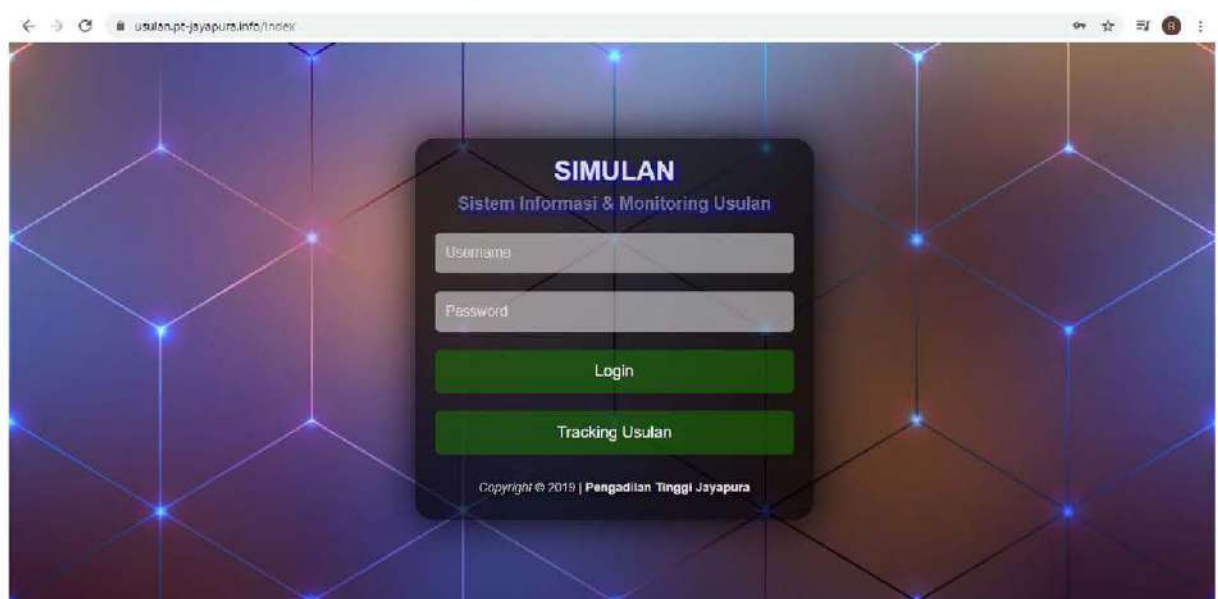
Aplikasi Informasi dan Monitoring Usulan Kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku pemberi layanan di bidang kepegawaian untuk seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Jayapura dan aparaturnya Pengadilan Negeri di Provinsi Papua dan Papua Barat selaku pengguna layanan dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri selaku administrator Satker.

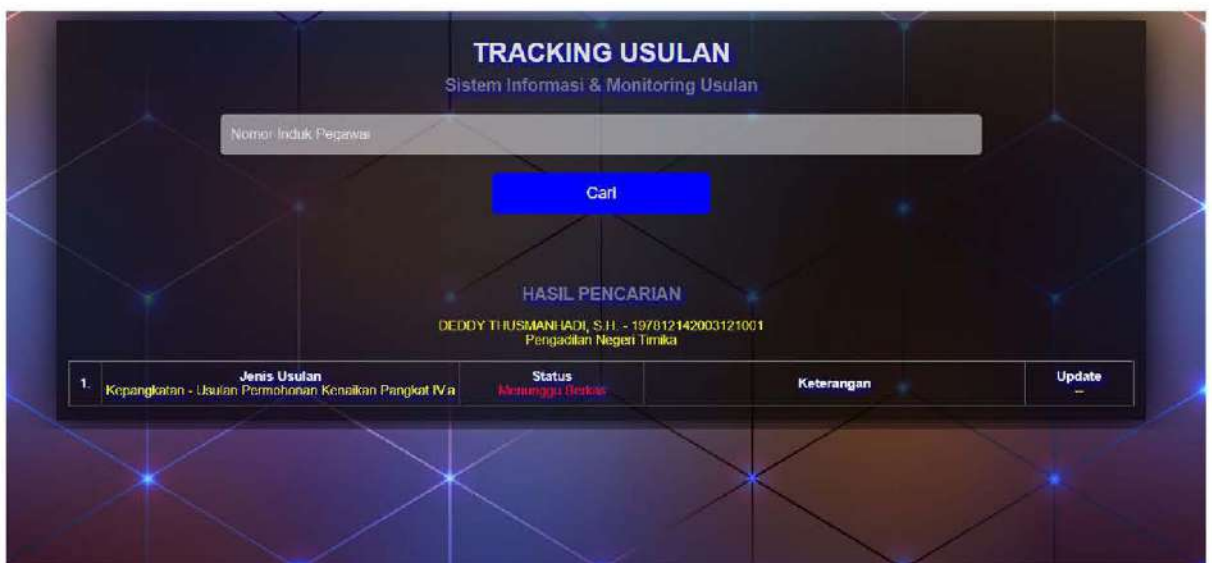
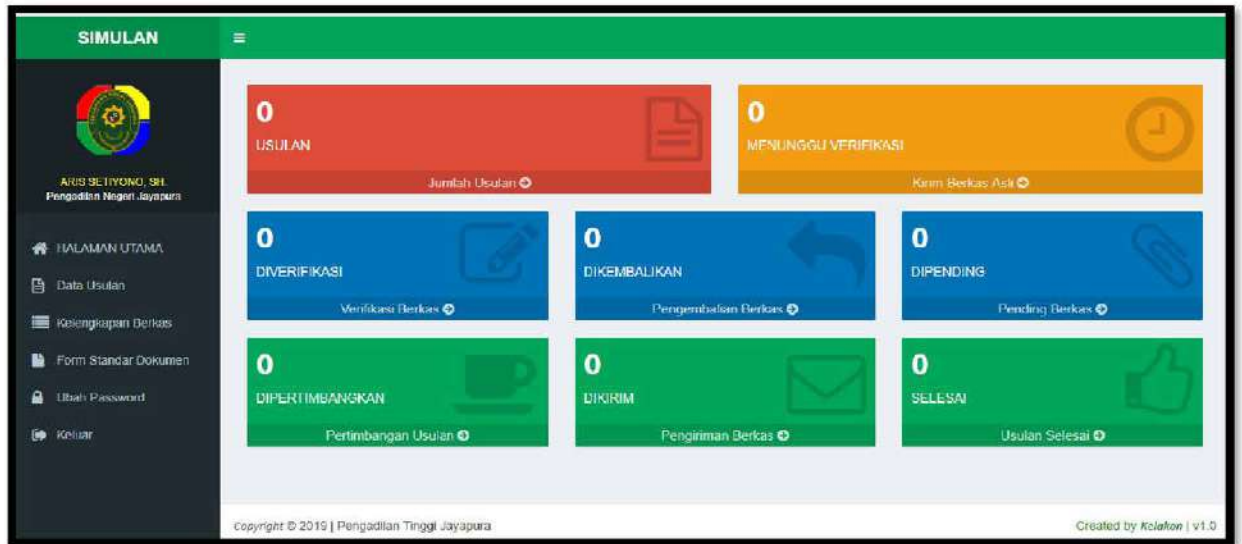
Beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain adalah:

1. Registrasi usulan yang diajukan
2. Proses usulan yang terdiri dari : verifikasi, pertimbangan, pengiriman / penerusan usulan
3. Laporan proses usulan
4. Informasi proses usulan
5. Monitoring proses usulan

Dengan adanya program aplikasi Informasi dan Monitoring Usulan Kepegawaian ini, diharapkan kebutuhan informasi dan monitoring proses usulan kepegawaian dapat terlayani dengan cepat, akurat dan transparan secara digital dan online yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap administrator Satker yaitu petugas sub bagian Kepegawaian pada satuan kerja masing - masing melalui komputer, laptop maupun smartphone dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan jaringan internet dan tentunya akan sangat mendukung kinerja Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI .

Berikut beberapa tampilan dari Aplikasi SIMULAN :





3. Aplikasi SIMONTI

SISTEM INFORMASI CUTI PEGAWAI merupakan portal informasi dan pengelolaan administrasi cuti bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura serta Ketua Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura, dapat diakses secara online melalui website PT Jayapura atau melalui alamat situs <https://cuti.pt-jayapura.info/>

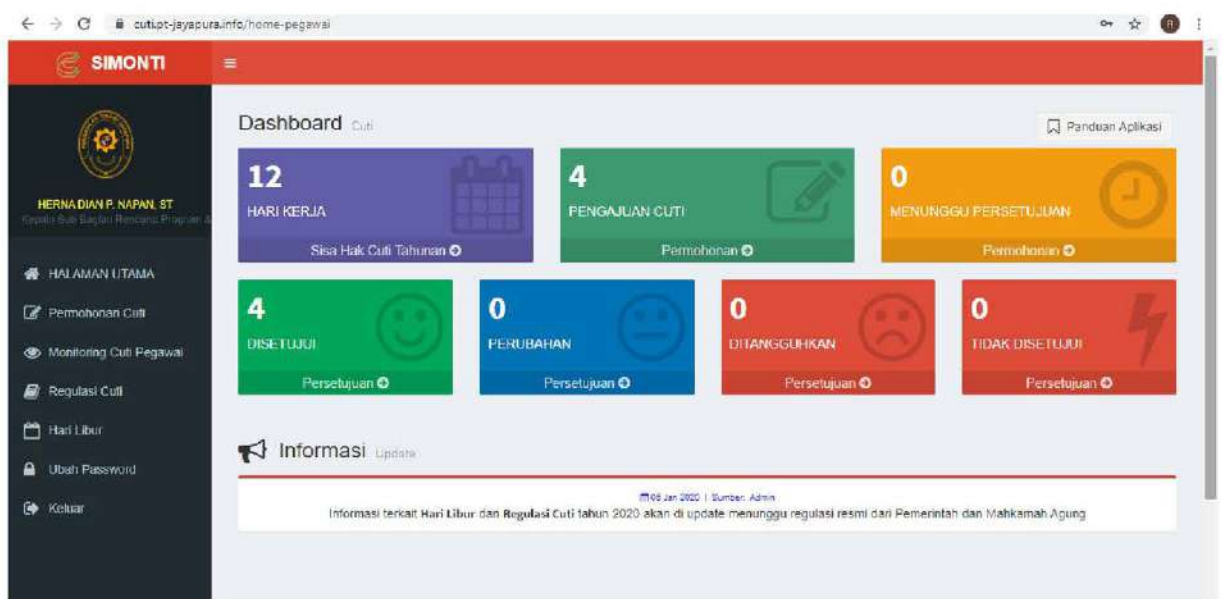
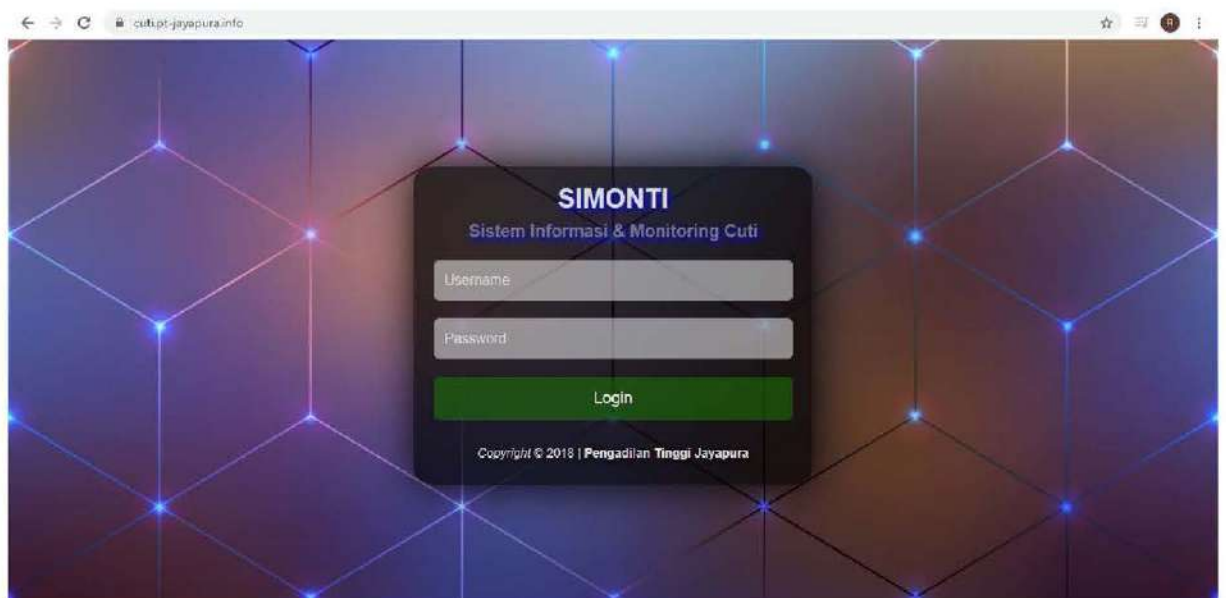
Pengelolaan administrasi cuti dimaksud adalah proses pelaksanaan cuti mulai dari pengajuan permohonan cuti sampai dengan penyampaian dokumen cuti setelah mendapatkan catatan/pertimbangan/persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan Catatan Cuti, Pertimbangan Cuti dan Persetujuan Cuti.

TUJUAN pemanfaatan Sistem Informasi & Monitoring Cuti ini adalah

- Memberikan Informasi terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Sisa Hak Cuti Tahunan 2 (dua) tahun sebelumnya (T-2), 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) dan tahun berjalan (Tahun ini)

- Informasi jumlah pengajuan permohonan cuti dan informasi proses persetujuan cuti (Disetujui/Perubahan/Ditangguhkan/Ditolak)
- Informasi terkait regulasi atau ketentuan tentang cuti yang berlaku
- Informasi tentang hari-hari libur, baik Libur Nasional, Libur Khusus Papua dan Cuti Bersama
- Mempermudah proses pengajuan permohonan cuti dengan formulir standar sesuai ketentuan
- Mempermudah panyampaian dan akses untuk mendapatkan dokumen cuti secara elektronik
- Sebagai bentuk pencatatan dan monitoring cuti secara elektronik
- Sebagai bentuk pengarsipan dokumen cuti secara elektronik

Berikut beberapa tampilan Aplikasi SIMONTI :



PN Jayapura

- Mesin antrian PTSP, untuk memudahkan layanan pada PTSP yang lebih baik kepada pencari keadilan.
- Mesin EDC untuk mendukung e-Court dan survey IKM dan IPK.
- Poyment bank BTN untuk menyettor uang perkara.
- Pojoek e-Court, pojok informasi tentang e-Court.
- Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan.

PN Sorong

- SIPINANG (Sistem Informasi Pidana di Pengadilan), membantu dalam alur penerimaan Persetujuan Penyitaan maupun Pengeledahan.
- RAJAWALI (Sasaran Kerja Pegawai Online), membantu dalam membuat SKP secara online oleh masing-masing pegawai.
- Wifi untuk Pengunjung Sidang, koneksi wifi gratis bagi pengunjung sidang.

PN Merauke

- Aplikasi SIPEN-MRK (Sistem Informasi Pengadilan Negeri Merauke) Aplikasi virtual assitant berbasis whitasapp bot untuk memberikan informasi layanan pengadilan untuk masyarakat, stakeholder internal dan eksternal.
- e-Reminder KGB dan KP, untuk mengingatkan dan memproses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (KP).
- e-Service, pelayanan yang dilakukan PN Merauke menggunakan teknologi informasi / media sosial.
- Simetaline (Surat Ijin Mengunjungi Tahanan Online), dapat diakses keluarga/kerabat terdakwa yang ingin mengunjungi secara daring.
- e-Survey, aplikasi untuk mengetahui penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PN Merauke dan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
- e-Court Corner: Masuk Distrik Pojok Informasi tentang e-Court para masyarakat dapat mengetahui informasi tentang e-Court di Kantor Distrik Ullilin, Jagebob, Elkobel, Muting dan Animha
- Aplikasi Sipidum (Sistem Informasi Pidana Umum) untuk pelayanan perpanjangan penahanan dan ljin penyitaan yang dilakukan secara online sehingga kejaksanaan, kepolisian, lapas, bapas dapat mengakses dari jarak jauh.

PN Nabire

- E-Survey, Survey Indeks Persepsi Korupsi PN Nabire.
- Eraterang, aplikasi surat keterangan elektronik berbasis website.
- Elektronik Surat Izin Besuk pada Pengadilan Negeri Nabire
- SPT (Sistem Pidana Terintegrasi), sistem peradilan pidana yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri Nabire.
- Antrian PTSP Elektronik.
- Pojoek e-Court, pojok informasi tentang e-Court.

PN Serui

- Audio Gratifikasi, diperdengarkan untuk semua pengunjung PN Serui.
- Eraterang, untuk keperluan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Serui.
- VAIS (Virtual Assistant Information Sistem), menampilkan jadwal informasi sidang, disposisi surat PTSP, mengecek tunggakan pada aplikasi MIS melalui fitur whatsapp.
- Pojoek e-Court, pojok informasi tentang e-Court.

PN Biak

- Aplikasi Pemanggilan Sidang, pelayanan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, layaknya panggilan nasabah bank.
- E-Tilang, pelayanan kepada masyarakat untuk menemukan informasi denda tilang yang akan dibayarkan di Kantor Kejaksanaan.
- Insos Tivani (Informasi Seputar Aktivitas Pengadilan Negeri), layanan chat bot virtual seputar informasi mengenai PN Biak.
- Antrian Layanan, membantu nomor antrian layanan.
- SP2T (Sistem Peradilan Pidana Terpadu), mempermudah proses administrasi penyidikan baik Kepolisian, Kejaksanaan, Pengadilan dan juga Lembaga Pemasyarakatan.

PN Kota Timika

- Audio Peringatan Anti Gratifikasi.
- viaMENO, aplikasi menjawab otomatis lewat aplikasi whatsapp.
- Monitor Jadwal Sidang Perkara.
- Pojoek e-Court, pojok informasi tentang e-Court.
- Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan.

PN Fakfak

- Posbakum Online, layanan Pos Bantuan Hukum Online yang dapat diakses melalui website pn-fakfak.go.id
- Pojoek e-court, pojok informasi tentang e-court.
- Visualisasi Video untuk E-Court, Gratifikasi. Penyampaian informasi mengenai e-Court dan gratifikasi berupa video.
- Eraterang, pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Fakfak.

PN Manokwari

- Pojoek e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Manokwari.

PN Wamena

- ✚ Eraterang, aplikasi surat keterangan elektronik berbasis website pada Pengadilan Negeri Wamena.
- ✚ Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Wamena.

PN Kaimana

- ✚ Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Kaimana.
- ✚ Eraterang, pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Kaimana.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Peradilan Tingkat Banding berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

Setiap atasan langsung wajib:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pengawasan melekat secara lengkap tertuang dalam Perma 8 tahun 2016.

2. Pengawasan Bidang

Guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang melalui Surat Keputusan Nomor : W30-U/71/KPT/SK/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Hakim Tinggi	Ket
1	Kepaniteraan Perdata	- SUPOMO, S.H., M.H. - ANDI ASTARA, S.H., M.H.	
2	Kepaniteraan Pidana	- PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.	

3	Kepaniteraan Khusus Tipikor	- ANDI ASTARA, S.H., M.H. - Dr. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H. - Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H.	
5	Kepaniteraan Hukum	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.	
6	Sub Bagian Kepegawaian dan IT	- WISMONOTO, S.H. - ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.	
7	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	- WISMONOTO, S.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	
8	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	- SUPOMO, S.H. - YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.	
9	Sub Bagian Tata Usaha dan Tumah Tangga	- BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	

3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Nomor : W30-U/72/KPT/SK/7/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Daerah Pengawasan	Ket.
1	- WISMONOTO, S.H. - ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - Dr. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H. - Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	PN JAYAPURA	
2	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	PN SORONG	
3	- WISMONOTO, S.H.	PN MERAUKE	

	- PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.		
4	- YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H.	PN MANOKWARI	
5	- WISMONOTO, S.H. - ANDI ASTARA, S.H., M.H.	PN TIMIKA	
6	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	PN WAMENA	
7	- SUPOMO, S.H., M.H. - ANDI ASTARA, S.H., M.H.	PN NABIRE	
8	- WISMONOTO, S.H. - ANDI ASTARA, S.H., M.H.	PN SERUI	
9	- SUPOMO, S.H., M.H. - PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	PN BIAK	
10	- ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. - BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	PN FAKFAK	
11	- SUPOMO, S.H., M.H. - YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.	PN KAIMANA	

Pengawasan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura secara rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan jarak jauh yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui teleconference/zoom meeting untuk pengawasan jarak jauh.

Pengawasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- a. Memeriksa program kerja.
- b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/ pelaksanaan program kerja.
- c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.

- d. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura.
- e. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 dimana harus mematuhi aturan *social distancing*, maka pelaksanaan tugas peradilan termasuk pengawasan dan pembinaan harus dilaksanakan dengan jarak jauh (*remote distance*). Untuk itu diperlukan sebuah wadah yang memfasilitasi monitoring, evaluasi dan koordinasi antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan aplikasi monitoring dan evaluasi serta pembinaan, maka setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dipantau sewaktu-waktu (*realtime*) serta memudahkan koordinasi secara jarak jauh antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya.



Fasilitas Command Center diharapkan dapat menjawab tantangan "jarak jauh" karena letak geografis Pengadilan Negeri di

wilayah Papua dan Papua Barat yang hampir seluruhnya harus dijangkau dengan menggunakan pesawat dan biaya tinggi serta resiko tinggi sehingga pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dapat dilakukan dengan biaya ringan, intensitas dapat meningkat sekaligus manajemen resiko dapat diterapkan karena melalui beberapa sistem Aplikasi Pengadilan Tinggi Jayapura sewaktu-waktu (*realtime*) dapat memonitoring serta mengevaluasi kinerja peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura serta memudahkan koordinasi secara jarak jauh antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya.





Dalam hubungannya dengan pembangunan Zona Integritas, fasilitas ini dapat menghindarkan penyimpangan penggunaan anggaran pengawasan dan pembinaan yang sekaligus merupakan inovasi dalam membangun budaya kerja yang baru.

Pengawasan yang bersifat reguler/ rutin pada Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan maksud untuk :

- a) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- b) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c) Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d) Menilai kinerja aparat peradilan.
- e) Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).

B. EVALUASI

1. Pengawasan Melekat

Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura melakukan rapat secara berjenjang minimal 1 (satu) bulan sekali dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bagian agar tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.

Atasan langsung pada masing-masing bagian wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.

Atasan langsung merekomendasikan tindak lanjut kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.

Hasil rapat berjenjang akan dibawa ke rapat rutin bulanan/pleno yang akan membahas berbagai persoalan dan mengevaluasi hasil temuan dibagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Terhadap hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang.

2. Pengawasan Bidang

Hakim Tinggi Pengawas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan pada bidang/bagian yang ada melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab bidang/bagian masing-masing secara periodik minimal 1(satu) bulan sekali dengan menghadiri rapat berjenjang setingkat eselon IV yang dilakukan setiap bulan.

Laporan hasil pengawasan bidang/bagian kemudian disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)

Pengawasan rutin/reguler ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Hakim Tinggi Pengawas Daerah menyampaikan hasil pengawasan pada Pengadilan Negeri setelah selesai melakukan pengawasan serta membuat laporan hasil pengawasan daerah dan menyampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku koordinator pengawasan, untuk dibuatkan resume hasil pengawasan dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.

Hasil pengawasan berupa temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Jayapura, segera ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Jayapura.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang kami susun ini, memberikan gambaran dan kesimpulan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum pada peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dari Mahkamah Agung RI.
2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis baik kualitas maupun kuantitasnya masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan.
3. Pengawasan Internal terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura telah dijalankan dengan tertib namun masih terus dilakukan peningkatan kualitas bagi Para Hakim Pengawas.
4. Pengelolaan Administrasi pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan ketertibannya.
5. Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura cukup baik, namun perlu ditingkatkan terus untuk mendukung perkembangan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru.

B. REKOMENDASI

1. Agar sosialisasi kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru terus menerus ditingkatkan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. Agar ditingkatkan alokasi pagu anggaran untuk Bimbingan Teknis baik untuk tenaga teknis maupun nonteknis demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penambahan formasi sumber daya manusia (hakim dan pegawai) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura.

3. Agar pengawasan lebih efektif dan obyektif, maka anggaran untuk pengawasan perlu ditingkatkan.
4. Perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan administrasi agar dapat dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
5. Perlu ditingkatkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI dan pelaksanaan Tugas Pokok peradilan umum.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Nomor : W30-U/1/KPT/SK/1/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung RI Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022;
 2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2022
- PERTAMA** : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun agar dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2022 paling lama pada minggu keempat bulan Januari 2023;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

ASLI GINTING, S.H., M.H.



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Nomor : W30-U/1/KPT/SK/1/2023
Tanggal: 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ASLI GINTING, S.H., M.H.	Ketua	Penasihat/Pelindung
2.	AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	DAHLAN, S.E., S.H.	Panitera	Sekretaris 1
5.	I GST KT SUARTA S.Sos., M.H.	Plt. Sektretaris	Sekretaris 2
6.	NURMAYANI, S.E.	Kabag Perencanaan & Kepeg.	Anggota
7.	ADOLF FORDATKOSSU, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	SUYATMI, S.H., M.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10.	ANY FITRIYATI, S.H.	Plt.Panitera Muda Pidana	Anggota
11.	DIANA BIAN, S.E.	Kasubag Keuangan & Pelaporan	Anggota
12.	AFRI YUHARA, S.Kom.	Kasubag TU & RT	Anggota
13.	HERNA DIAN P. NAPAN, S.T.	Kasubag Renprog & Anggaran	Anggota
14.	IRDA PALEPONG, S.H.	Pelaksana	Anggota
15.	ROLITA SIRAIT, S.H.	Pelaksana	Anggota
16.	MARTHA CHRISTINA KABES, S.E.	Pelaksana	Operator
17.	NUR ALQADRI, A.Md.	Pelaksana	Operator

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



ASLI GINTING, S.H., M.H.